

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN KLUNGKUNG

2023



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN KLUNGKUNG

2023

<https://klungkungkab.go.id>



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KLUNGKUNG

2023

Katalog : 4102004.5105
ISSN : -
Nomor Publikasi : 51050.2320

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 68 halaman

Penyusun Naskah : BPS Kabupaten Klungkung
Penyunting : BPS Kabupaten Klungkung
Pembuat Kover : BPS Kabupaten Klungkung

Penerbit : ©BPS Kabupaten Klungkung
Dicetak Oleh : BPS Kabupaten Klungkung

Sumber Ilustrasi : www.canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Indikator Kesejahteraan Rakyat

Kabupaten Klungkung 2023

Pengarah:

Ir. Ni Putu Minarni S., M.M.A

Penanggung Jawab:

Made Sukma Hartania, SST

Penyunting:

Made Sukma Hartania, SST

Penulis Naskah:

Amelia Syhadati, S.Tr.Stat.

Pengolah Data:

Amelia Syhadati, S.Tr.Stat.

Penata Letak:

Amelia Syhadati, S.Tr.Stat.

Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Klungkung antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari BPS, dan Dinas terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2011-2023.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kritik dan masukan selalu diundang dan dihormati dalam rangka penyempurnaan terbitan yang akan datang, sambil terus mengembangkan diskursus yang berkualitas, mengawal pembangunan ekonomi Kabupaten Klungkung. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terimakasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, Desember 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Klungkung



Ir. Ni Putu Minarni S., M.M.A.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Grafik	ix
Bab I. Kependudukan	1
I.1 Pendahuluan.....	3
I.2 Pertumbuhan Penduduk.....	5
I.3 Sex Ratio	6
I.5 Status Perkawinan.....	9
I.6 Kepemilikan Akta Kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).....	11
Bab II. Kesehatan	15
II.1 Tempat Melahirkan dan Penolong Kelahiran.....	17
II.2 Imunisasi.....	17
II.3 Keluhan Kesehatan dan Tingkat Kesakitan.....	19
Bab III. Pendidikan	23
III.1 Pendidikan	25
Bab IV. Fertilitas.....	37
IV.1 Fertilitas dan Kontrasepsi.....	37
Bab V. Perumahan	45
V.1 Bangunan Tempat Tinggal.....	43

V.2 Sumber Penerangan.....	46
V.3 Sumber Air Minum	46
V.4 Fasilitas Buang Air dan Bahan Bakar	48
Bab VI. Teknologi Informasi	57
VI.1 Akses Perangkat Elektronik dan Internet.....	55
Bab VII. Indikator Kesejahteraan Lainnya.....	65
VII.1 Ketimpangan.....	63
VII.2 Pengangguran.....	65
VII.3 Kemiskinan.....	67

<https://klungkungkab.bps.go.id>

Daftar Grafik

Grafik I.1. Proyeksi Penduduk Klungkung Menurut Jenis Kelamin, 2021-2023.....	5
Grafik I.2. Proporsi Penduduk Klungkung Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2019 - 2023.....	7
Grafik I.3. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Klungkung, 2020 - 2022.....	8
Grafik I.4. Penduduk Klungkung Umur 15-49 Tahun Menurut Status Perkawinan, 2020 - 2022.....	10
Grafik I.5. Penduduk Klungkung Umur 0 - 17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta, 2020 - 2022.....	12
Grafik I.6. Penduduk Klungkung Umur 5 Tahun Ke Atas Berdasarkan Kepemilikan NIK, 2019 - 2022.....	13
Grafik III.1 Penduduk 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021 - 2022	25
Grafik III.2 Penduduk 5 Tahun Ke Atas Berdasarkan Status Pendidikan, 2021 - 2022.....	26
Grafik III.3 Penduduk 7 - 24 Tahun Ke Atas Berdasarkan Status Pendidikan, 2021 - 2022.....	27
Grafik III.4 APK Kabupaten Klungkung Menurut Kelompok Umur, 2019 - 2022..	28
Grafik III.5 APS Kabupaten Klungkung Menurut Kelompok Umur, 2020 - 2022 ..	29
Grafik III.6 APM Kabupaten Klungkung Menurut Tingkat Pendidikan, 2020 - 2022.....	29
Grafik III.7 AMH Kabupaten Klungkung Menurut Jenis Kelamin, 2019 - 2022	31
Grafik III.8 HLS dan RLS Kabupaten Klungkung, 2010 - 2023	32

Grafik IV.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Kehamilan Pertama, 2022	37
Grafik IV.2 Persentase Perempuan Usia 15 - 49 Tahun Pernah Kawin Berdasarkan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2021 dan 2022.....	38
Grafik V.1 Persentase Bangunan Tempat Tinggal Menurut Status Kepemilikan, 2021 dan 2022	43
Grafik V.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal (m ²), 2020-2021	44
Grafik V.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita, 2020-2021	45
Grafik V.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2020-2021	46
Grafik V.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama, 2020-2021	47
Grafik V.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll, 2022.....	48
Grafik V.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2021-2022	49
Grafik V.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak, 2021	50
Grafik VI.1 Persentase Kepemilikan Laptop/Komputer dan PSTN Menurut Rumah Tangga di Kabupaten Klungkung, 2017-2021	55
Grafik VI.2 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Kepemilikan dan Penggunaan Telepon Genggam di Kabupaten Klungkung, 2022.....	56
Grafik VI.3 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dan Menggunakan Komputer Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung, 2021	57

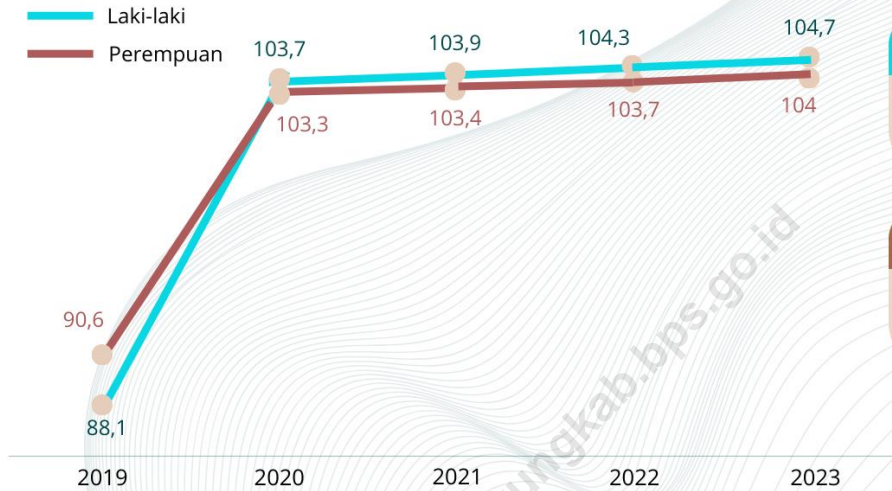
Grafik VI.4 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Menurut Lokasi di Kabupaten Klungkung, 2021.....	58
Grafik VI.5 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Menurut Penggunaannya di Kabupaten Klungkung, 2021.....	59
Grafik VII.1 Perkembangan Indikator Gini Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali, 2000-2022.....	64
Grafik VII.2 Perkembangan Distribusi Pendapatan Menurut Bank Dunia Kabupaten Klungkung, 2019-2022.....	65
Grafik VII.3 Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Klungkung, 2015-2022.	66
Grafik VII.4 Perkembangan Jumlah (000 Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung, 2010 - 2023	68

<https://klungkungkab.go.id>

KEPENDUDUKAN



Proyeksi Penduduk Kabupaten Klungkung Menurut Jenis Kelamin (ribu jiwa), 2019-2023



Proyeksi Penduduk Laki-Laki, 2023

104,7
Ribu jiwa

Proyeksi Penduduk Perempuan, 2023

104
Ribu jiwa

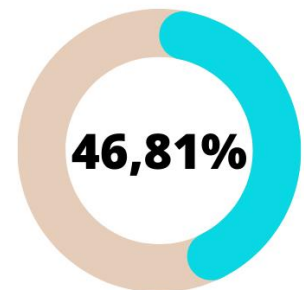
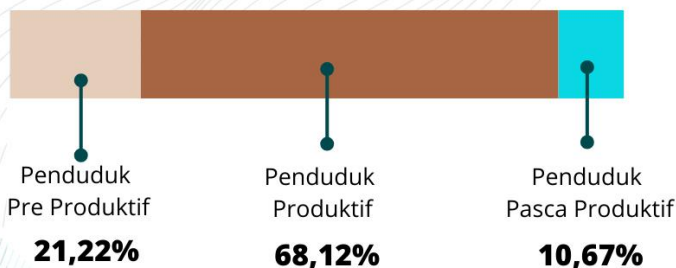
Sex Ratio di Kabupaten Klungkung, 2023



100,67

Setiap 100 Penduduk Perempuan terdapat 101 Penduduk Laki-laki

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Klungkung, 2022



Dari 100 penduduk usia produktif akan menanggung 47 penduduk yang bukan usia produktif

BAB 1

KEPENDUDUKAN

I.1 Pendahuluan

Isu mengenai kesejahteraan berkembang sesuai dengan progres pembangunan. Pembangunan setelah era Perang Dunia II berkembang tidak hanya bergerak dari perbaikan infrastruktur melainkan mulai menyentuh pada perbaikan kualitas hidup. Percepatan pada pembangunan kualitas hidup ini mengalami perbedaan antara belahan dunia bagian timur dan barat selepas perang. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa salah satu kunci perbedaan perkembangan ini terletak tidak hanya pada kemampuan mengelola sumber daya sebagai spesialisasi dalam daya saing melainkan juga terletak pada pengendalian penduduk, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan pengangguran serta demokrasi dan kebebasan.

Kesejahteraan adalah tentang sustainabilitas keamanan. Sejahtera merupakan sebuah kondisi (*state*) dan bukan tentang perasaan. Sebagai bagian dari kemampuan yang berkelanjutan, kesejahteraan berbicara tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan hari ini melainkan juga tentang terjaganya peluang pemenuhan di masa depan. Oleh karena itu sejatinya, pengukuran mengenai kesejahteraan tidak hanya pada kondisi saat ini melainkan pada kemampuan untuk mempertahankan standar hidup yang sama di masa depan.

Sebagian teori meyakini bahwa kesejahteraan adalah pendorong kebahagiaan baik dalam level individu maupun komunal. Hanya saja kesejahteraan itu bukan tentang kuantitas tapi kualitas. Sifatnya yang bukan tentang jumlah ini kemudian menggerakkan atau menantang orang untuk mengkuantifikasinya atau setidaknya membuat seperangkat indikator untuk melihat bentuk atau levelnya.

***Paradigma kesejahteraan berbeda dengan kebahagiaan.
Kesejahteraan adalah sustainabilitas keamanan , sementara
kebahagiaan adalah keberlanjutan kepuasan dan pencapaian.***

Oleh karena itu indikator kesejahteraan sejatinya bukanlah tentang seberapa orang merasa sejahtera namun syarat dan prasyarat apa seseorang dikatakan sejahtera atau setidaknya siap untuk sejahtera, karena kembali lagi ini tentang kualitas budi bukan kualitas yang dikuantifikasi.

Kesejahteraan oleh beberapa ahli seringkali dirangkum dalam beberapa aspek. Tapi tiga aspek yang umum dinilai adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kelayakan pada ketiga hal ini mengindikasikan bahwa seseorang sudah berada pada level kuantitas kesejahteraan yang memadai. Pengukuran kesejahteraan sedikit berbeda dengan pengukuran kebahagiaan. Pengukuran tentang kebahagiaan seringkali mencakup tentang kepuasan akan pencapaian, indeks dimensi perasaan dan indeks dimensi makna hidup.¹

Dalam konteks kesejahteraan, penduduk atau masyarakat adalah subyek sekaligus obyek sentral. Kesejahteraan penduduk adalah salah satu tujuan pembangunan suatu negara sementara di sisi lain kesejahteraan penduduk tidak akan tercipta tanpa peningkatan kualitas individu. Negara adalah promotor dan pemberi insentif peningkatan kesejahteraan melalui program-programnya, hanya saja tanpa kesadaran dan tekad individu, peningkatan kualitas tentu tidak akan dapat diperoleh lebih mudah dan seringkali justru mengalami stagnansi.

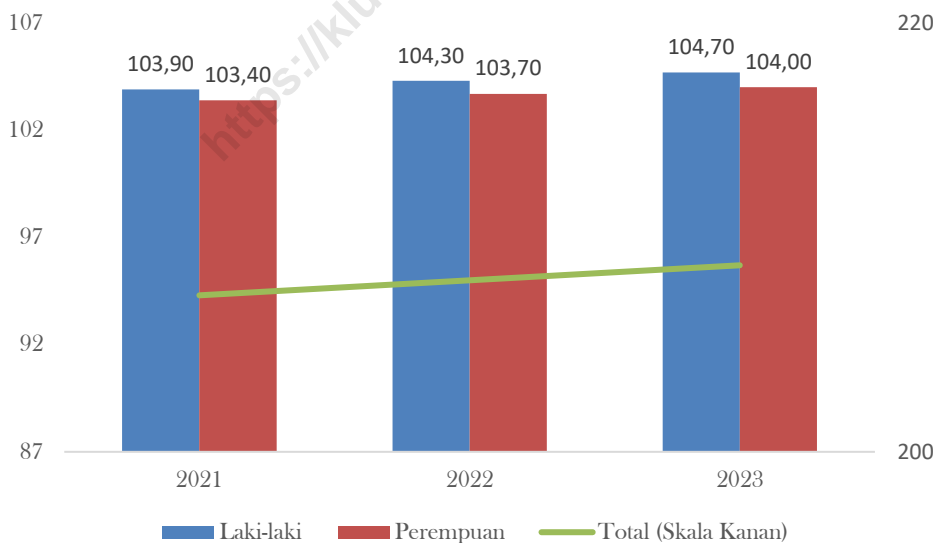
Di sisi lain dalam konteks kesejahteraan, faktor kuantitas penduduk akan berpengaruh dilihat dari sisi pertumbuhannya yang secara perlahan akan mempengaruhi kepadatannya. Harus diakui bahwa distribusi hunian penduduk di suatu wilayah sangat jarang yang tersebar secara merata. Selain karena faktor geografis, penduduk biasanya terpusat pada wilayah aktivitas ekonomi. Hal inilah salah satu yang menjadi alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan.

¹ Keterangan ini dapat diakses pada laman <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sd/view&kd=2926&th=2013>

1.2 Pertumbuhan Penduduk

Pada topik-topik terkini mengenai kependudukan, pola perpindahan penduduk antar daerah seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Sebagai contoh, migrasi penduduk terjadi dari daerah yang tingkat kelahirannya tinggi ke daerah yang kepadatannya tinggi karena merupakan pusat ekonomi. Hal ini tentu akan sangat merugikan dilihat dari sisi keseimbangan jumlah penduduk. Pola ini akan mengakibatkan suatu daerah akan kekurangan tenaga kerja karena sebagian angkatan kerjanya berpindah ke tempat yang menjadi pusat ekonomi. Daerah asal akan mengalami kerugian pada sisi ekonomi (kurangnya tenaga kerja) dan sosial (seperti halnya kemiskinan) sementara imbasnya di daerah tujuan lebih ke dampak sosialnya seperti halnya pengangguran, ketimpangan dan marjinalisasi penduduk miskin. Oleh karena itu seyogyanya kebijakan menyelaraskan migrasi harus didahului dengan kebijakan pemerataan sumber pembangunan.

Grafik I.1. Proyeksi Penduduk Klungkung Menurut Jenis Kelamin, 2021-2023



Sumber: BPS Kabupaten Klungkung

Secara spesifik Klungkung tidak memiliki permasalahan terkait dengan kependudukan. Laju penduduk Klungkung relatif terkendali dari waktu-waktu dengan

tingkat kepadatan yang tidak terlalu tinggi. Perbedaan jumlah penduduk menurut jenis kelamin pun tidak terlalu tinggi. Menurut hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 (SP2020) jumlah penduduk Klungkung di tahun 2023 tercatat mencapai 208,7 ribu jiwa. Jumlah ini tercatat meningkat sekitar 6 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 208,1 ribu jiwa.

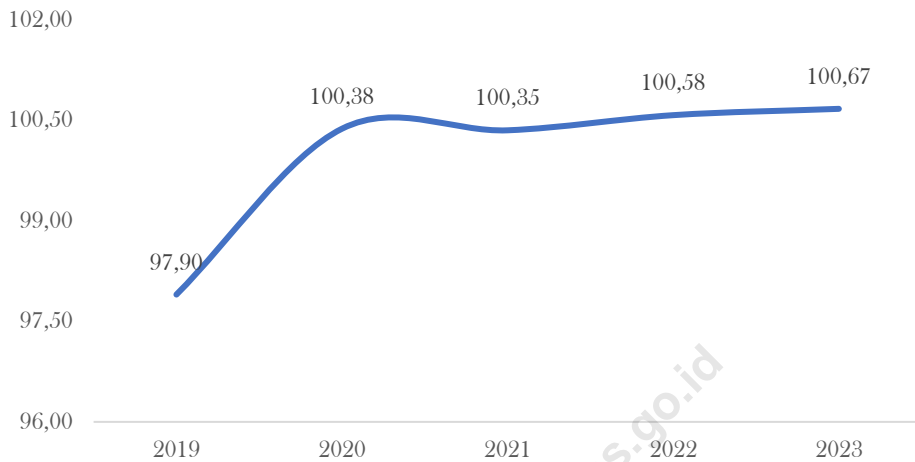
Dengan mengasumsikan bahwa tingkat kelahiran dan kematian yang tidak terlalu berbeda karena semakin baiknya kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan maka hal ini mengindikasikan bahwa Klungkung menerima jumlah migrasi dari luar Bali yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal yang seharusnya paling diantisipasi dari migrasi luar daerah adalah semakin padatnya penduduk di pusat ekonomi yaitu Denpasar dan Badung. Klungkung yang bukan merupakan pusat ekonomi Bali bukanlah tujuan favorit untuk pendatang, selain karena Klungkung sebagian besar ekonominya ditopang oleh pertanian yang tercatat sebagai lapangan usaha yang memiliki *border to entry* paling ketat dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.

1.3 Sex Ratio

Dalam dua tahun terakhir rasio jenis kelamin di Kabupaten Klungkung lebih dari 100, yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Namun, pada tahun 2021 sex ratio Kabupaten Klungkung mengalami penurunan dari 100,38 persen menjadi 100,35 persen. Sex ratio di Kabupaten Klungkung salah satunya disebabkan karena pertumbuhan penduduk perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki secara eksponensial. Namun hal itu tidak merubah komposisi penduduk seperti tahun sebelumnya, dimana penduduk laki-laki tetap lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Proporsi penduduk kemudian meningkat lagi di tahun 2022 dan 2023. Pada dua tahun ini sex ratio tercatat meningkat dari 100,58 menjadi 100,67. Sex ratio di tahun 2023 tercatat sebagai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Grafik I.2. Proporsi Penduduk Klungkung Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2019 - 2023



Sumber: BPS Kabupaten Klungkung

Perhatian mengenai *sex ratio* mengemuka setelah isu mengenai kesetaraan gender menjadi hal yang serius. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

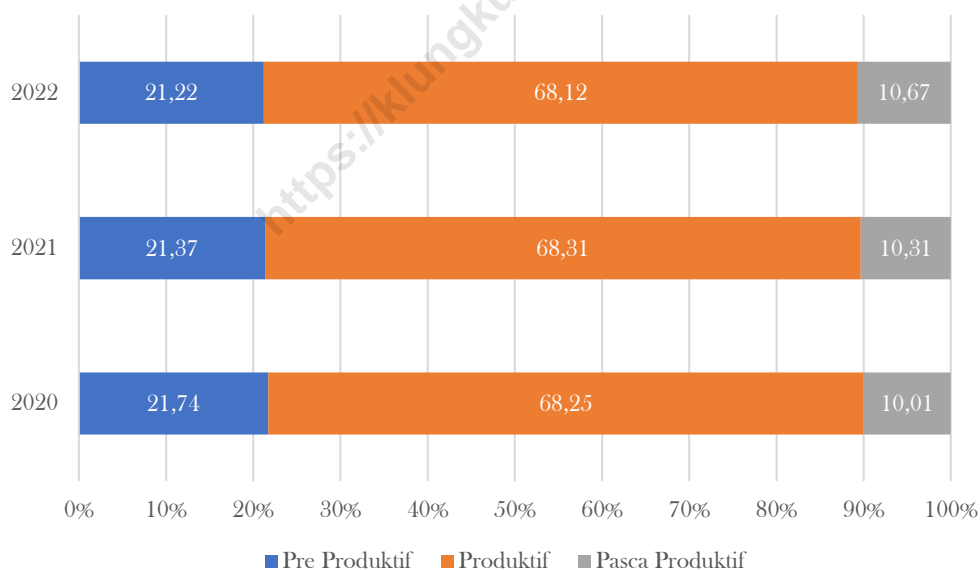
I.4 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat

digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Interpretasi paling sederhana dari rasio ketergantungan adalah sebagai berikut, apabila rasio ketergantungan tercatat 55 maka dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk usia produktif di suatu wilayah akan menanggung 55 orang yang bukan usia produktif.

Grafik I.3. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Klungkung, 2020 - 2022



Pada tahun 2021 rasio ketergantungan penduduk pre produktif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Angka ketergantungan pre produktif menurun dari 31,85 persen menjadi 31,29 persen sementara untuk ketergantungan pasca produktif mengalami kenaikan dari 14,67 persen menjadi 15,10 persen. Hal ini

menunjukkan terjadi kenaikan pada proporsi penduduk usia tua sementara di sisi lain terjadi penurunan proporsi penduduk usia pre produktif. Di lain pihak angka kebergantungan total mengalami penurunan dari 46,53 persen menjadi 46,39 persen. Rasio ketergantungan tahun 2021 tercatat 46,39 maka dapat dikatakan bahwa dari 100 penduduk usia produktif di suatu wilayah akan menanggung 46 orang yang bukan usia produktif. Rasio ketergantungan meningkat di tahun 2022 menjadi 46,81. Peningkatan ini dipicu oleh meningkatnya kelompok pasca produktif meskipun dari kelompok pre produktif mengalami penurunan. Ketergantungan pre produktif tercatat mencapai 31,15 persen dan pasca produktif menjadi 15,66 persen. Angka rasio ketergantungan ini semakin lama semakin ditinggalkan penggunaannya terutama mengingat tidak ada penyesuaian terhadap penduduk yang bekerja pada kelompok usia tertentu terutama pada pengelompokan menurut pekerja formal maupun non formal.

I.5 Status Perkawinan

Status kawin tidak hanya bagi mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

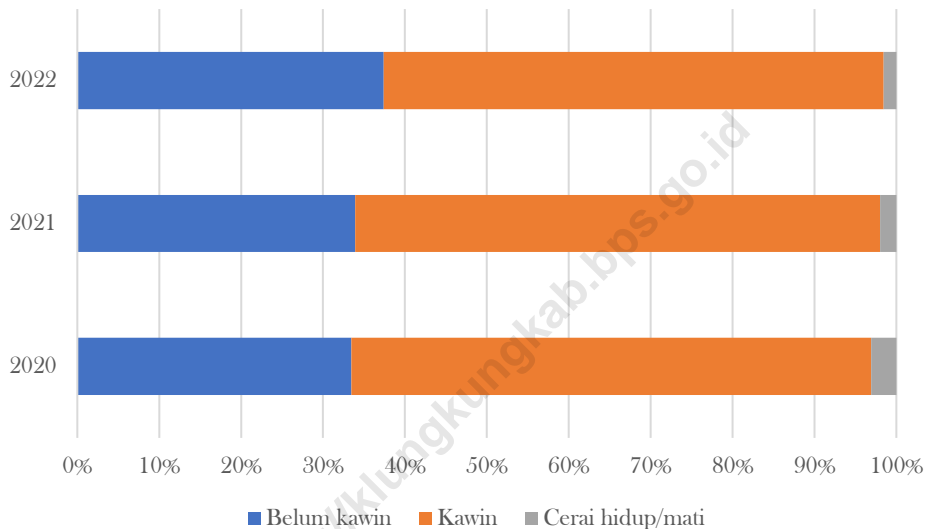
BPS Mengenal 4 status perkawinan yang meliputi :

1. Belum Kawin.
2. Kawin adalah seseorang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri.
3. Cerai hidup adalah seseorang yang telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari

pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

4. Cerai mati adalah seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Grafik I.4. Penduduk Klungkung Umur 15-49 Tahun Menurut Status Perkawinan, 2020 - 2022



Selama tahun 2020 dan 2021 tercatat persentase penduduk yang kawin di Klungkung merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan status perkawinan lainnya. Persentasenya mencapai hampir dua per tiga penduduk yang ada di Klungkung. Persentase perempuan yang kawin lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, sementara persentase laki-laki yang belum kawin lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Perbedaan yang cukup mencolok terjadi pada persentase penduduk yang belum kawin, 42,54 persen penduduk laki-laki Klungkung belum kawin dan hanya 32,05 persen perempuan yang belum kawin. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok cerai mati, persentase perempuan yang berstatus cerai lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki Klungkung. Hal lain yang menjadi perhatian adalah persentase penduduk yang tamat SD ke bawah belum kawin mencapai 26 persen jauh lebih rendah dibandingkan dengan tamat SMP ke atas.

Sebagian besar penduduk yang berstatus kawin tercatat bertempat tinggal serumah dengan pasangannya. Meskipun demikian tercatat beberapa pasangan kawin bertempat tinggal di satu tempat tinggal. Di tahun 2021, penduduk kawin yang bertempat tinggal bersama mencapai 98,46 persen. Dari angka ini hanya sekitar 1,54 persen yang tidak tinggal bersama. Persentase yang tinggal bersama ini tercatat menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

I.6 Kepemilikan Akta Kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang sudah dicetak. Setiap kalinya, istilah seperti ini dapat mengacu kepada setiap catatan resmi berlandaskan undang-undang yang resmi menetapkan hal-hal mengenai kelahiran seorang anak dan juga berlaku pada salinan lembaran pencatatan akta lahir yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

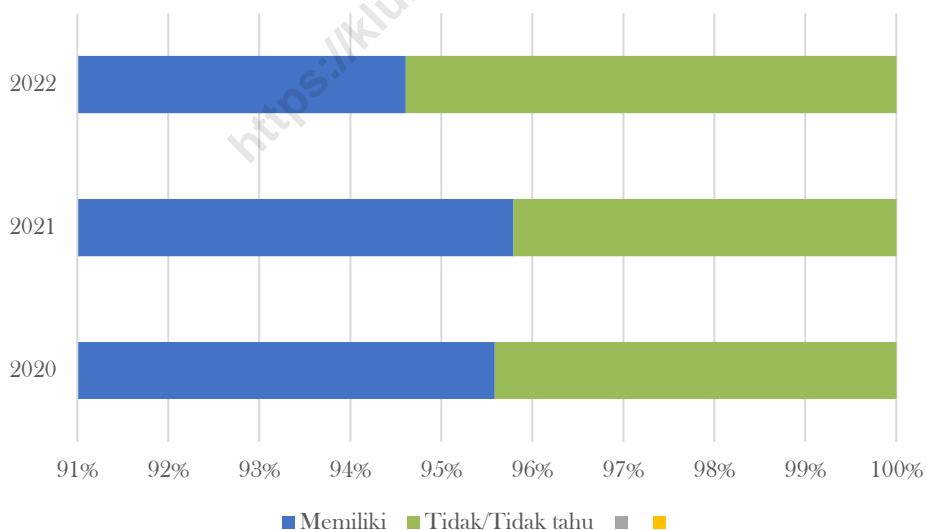
Biasanya, sebuah akta lahir terdiri atas pencantuman beberapa maklumat sebagai berikut :

- Nama kelahiran anak
- Tanggal dan waktu kelahiran anak
- Jenis kelamin anak
- Tempat kelahiran anak
- Nama kedua orangtua dari seorang anak
- Pekerjaan kedua orangtua seorang anak
- Berat dan tinggi badan anak
- Nama seorang juru tunjuk yang mencatatkan pendaftaran kelahiran anak
- Tanggal pencatatan pendaftaran kelahiran

- Tanda tangan pejabat yang berwenang

Tren kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk umur 0 - 17 tahun terus mengalami kenaikan. Di tahun 2021 hanya sekitar 4,21 persen yang belum memiliki akta kelahiran. Jumlah ini menurun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,41 persen. Integrasi kepemilikan akta kelahiran dengan berbagai jaminan sosial dan kesehatan telah menumbuhkan kesadaran masyarakat secara lebih baik untuk mengurus kepemilikannya. Hal ini juga akan berpengaruh positif pada semakin baiknya data registrasi penduduk secara keseluruhan. Hanya saja yang masih menjadi perhatian adalah masih cukup banyaknya kepemilikan akta yang belum dapat ditunjukkan. Di tahun 2022 persentasenya penduduk yang tidak memiliki atau tidak tahu akan kepemilikan akta kelahirannya mencapai 5,39 persen. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 4,1 persen.

Grafik I.5. Penduduk Klungkung Umur 0 - 17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta, 2020 - 2022

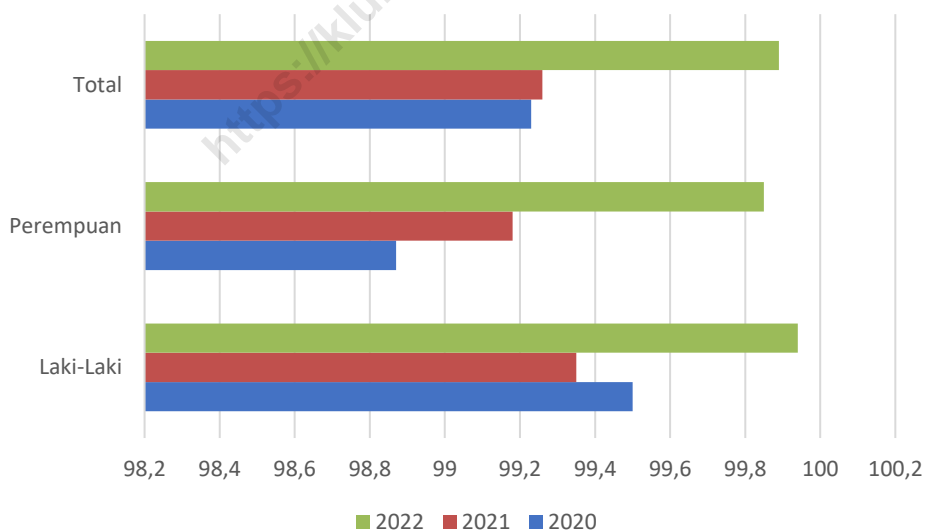


Identitas lain yang berkenaan dengan kependudukan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nomor Induk Kependudukan atau NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar

sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi.

NIK terdiri dari 16 digit. Kode penyusun NIK terdiri dari 2 digit awal merupakan kode provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format hhhbtt (untuk wanita tanggal ditambah 40), lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari 0001. NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan KTP, paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Grafik I.6. Penduduk Klungkung Umur 5 Tahun Ke Atas Berdasarkan Kepemilikan NIK, 2019 - 2022



Sumber: BPS Kabupaten Klungkung

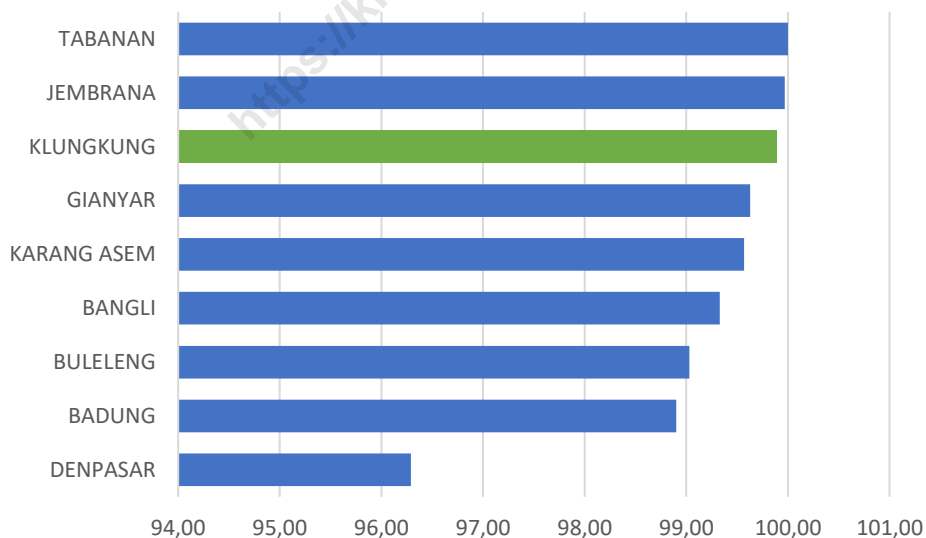
Hanya sekitar 0,11 persen penduduk Klungkung di tahun 2022 yang belum memiliki NIK. Di lain pihak, apabila mengacu pada persentase secara keseluruhan yaitu

dengan tidak hanya melibatkan penduduk usia 5 tahun ke atas, maka persentase penduduk yang memiliki NIK di Klungkung tertinggi urutan ketiga dibandingkan dengan wilayah lain di Bali. Klungkung dapat mengoptimalkan jumlah penduduknya yang paling kecil untuk memaksimalkan penduduknya tertib pada dokumen administrasi kependudukan. Tentu saja hal ini merupakan suatu pencapaian penting dalam percepatan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Klungkung

Semakin besar persentase yang memiliki NIK berarti semakin besar penduduk dapat dilayani oleh layanan kesehatan terutama oleh jasa yang diusahakan oleh pemerintah. Persentase terendah penduduk tidak ber-NIK di Klungkung dapat diartikan juga bahwa secara jumlah terkecil urutan ke-empat dibandingkan lainnya. Di tahun 2022, Klungkung merupakan wilayah dengan persentase kepemilikan NIK tertinggi ketiga di Bali yang mencapai 99,89 persen.

Grafik I.7

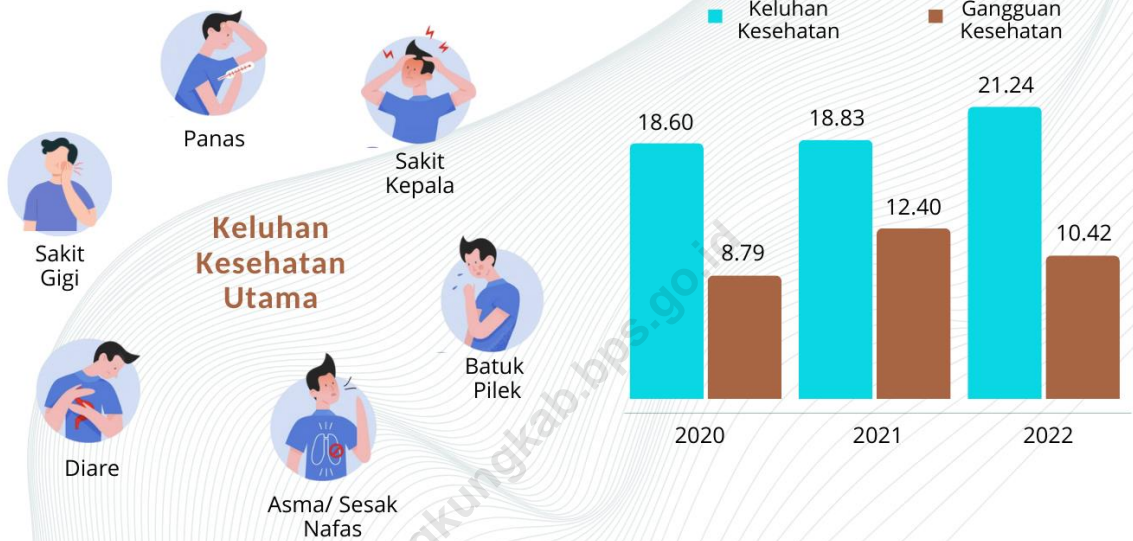
Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Kepemilikan NIK, Tahun 2022



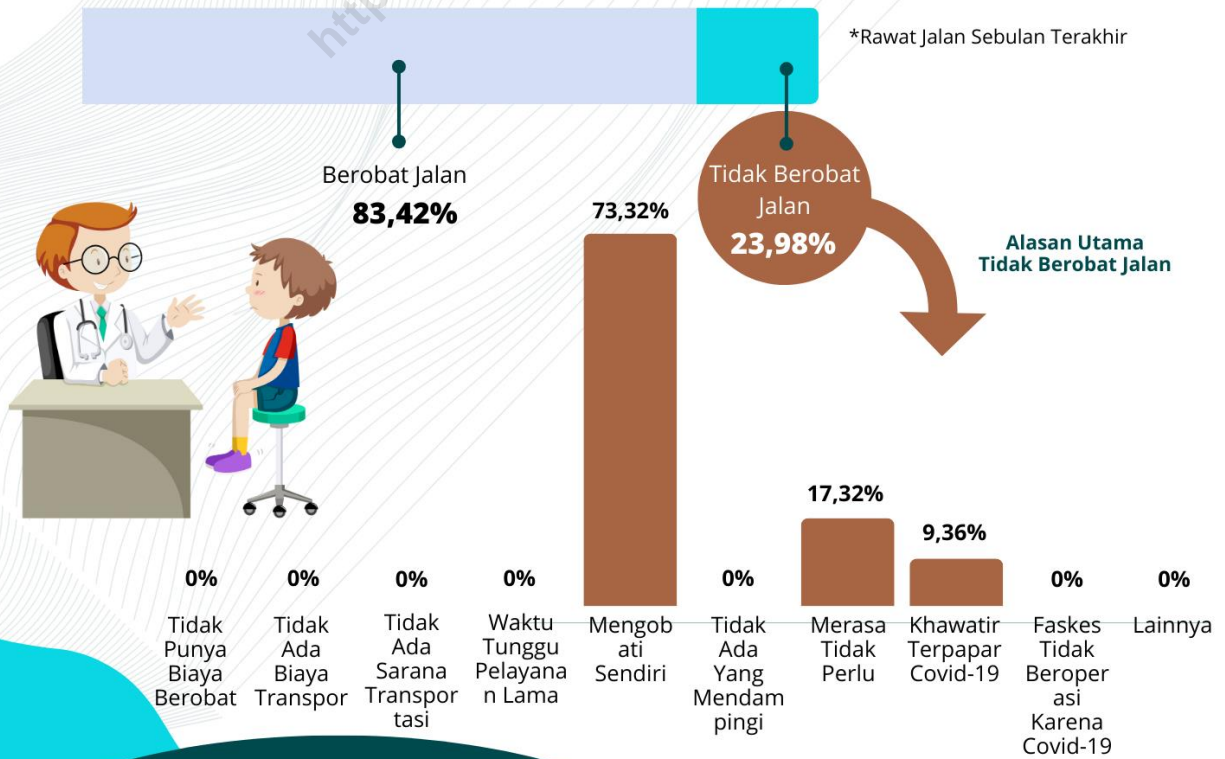
KESEHATAN



Angka Kesakitan dan Keluhan Kesehatan Penduduk Kabupaten Klungkung, 2020-2022



Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan dan Keputusan untuk Berobat Jalan Kabupaten Klungkung, 2022



BAB II

KESEHATAN

II.1 Tempat Melahirkan dan Penolong Kelahiran

Proses kelahiran adalah proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir (vagina), keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir), hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta. Seorang ibu yang melahirkan bisa ditolong oleh lebih dari satu jenis penolong (misalnya dukun bersalin dan bidan). Kelahiran adalah ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran.

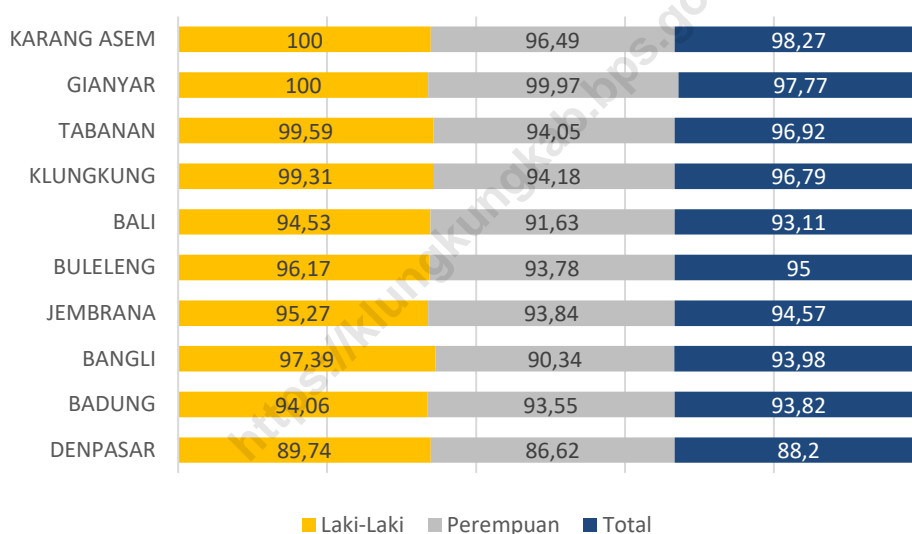
Dilihat dari tempat melahirkannya, seluruh proses melahirkan dilakukan di fasilitas kesehatan. Klungkung tidak memiliki rumah sakit yang secara khusus menangani persalinan. Oleh karenanya, ibu yang ingin melahirkan di rumah sakit bersalin harus ke wilayah lain seperti halnya Gianyar maupun Denpasar. Dilihat dari penolong kelahirannya, mengingat semua proses melahirkan dilakukan di fasilitas kesehatan maka semua penolong melahirkan dibantu oleh tenaga kesehatan. Tingginya persentase ini menunjukkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan campur tangan medis di Klungkung relatif sudah cukup baik. Ini juga menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan juga sudah cukup memadai. Persentase ini menunjukkan bahwa proses persalinan yang dilakukan di rumah sakit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

II.2 Imunisasi

Secara umum anak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari virus dan bakteri sejak ia masih dalam kandungan. Ini dikarenakan sel pembentuk antibodi, sel B dan sel T, telah terbentuk sejak usia kehamilan 14 minggu dan terus berkembang di tahun pertama kelahiran. Meski begitu, sistem imun bayi tidak sekuat sistem imun orang

dewasa. Sebab, antibodi yang berasal dari tubuh ibu akan mengalami penurunan secara pasif selama beberapa bulan pertama. Akibatnya, bayi sangat rentan terhadap penyakit karena di dalam tubuhnya belum terbentuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Dengan melakukan imunisasi bayi, berarti kita melindungi bayi kita dari berbagai penyakit di masa yang akan datang. Vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh anak akan membantu sistem kekebalan tubuh anak untuk membentuk antibodi, yang berfungsi untuk melawan virus atau bakteri yang masuk ke tubuhnya.

Grafik II.1 Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun Menurut Kepemilikan Kartu Imunisasi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2022



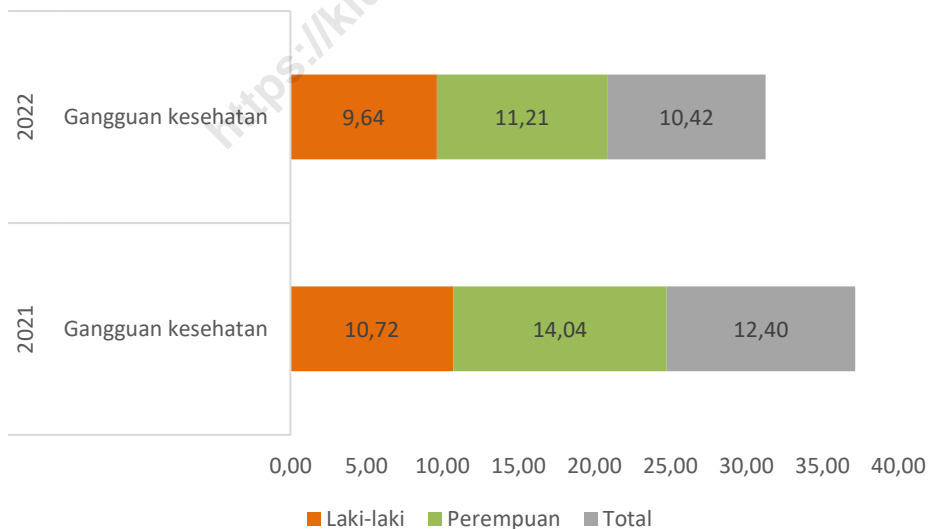
Pada tahun 2022 kepemilikan kartu imunisasi anak umur 0 -4 tahun di Kabupaten Klungkung mencapai 96,79 persen. Dari persentase ini kelompok jenis kelamin laki-laki memiliki persentase hingga 99,31 persen sementara perempuan mencapai 94,18 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain posisi Kabupaten Klungkung relatif berada di tengah. Untuk Provinsi Bali sendiri persentase kepemilikan kartu imunisasi mencapai 94,53 persen.

II.3 Keluhan Kesehatan dan Tingkat Kesakitan

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

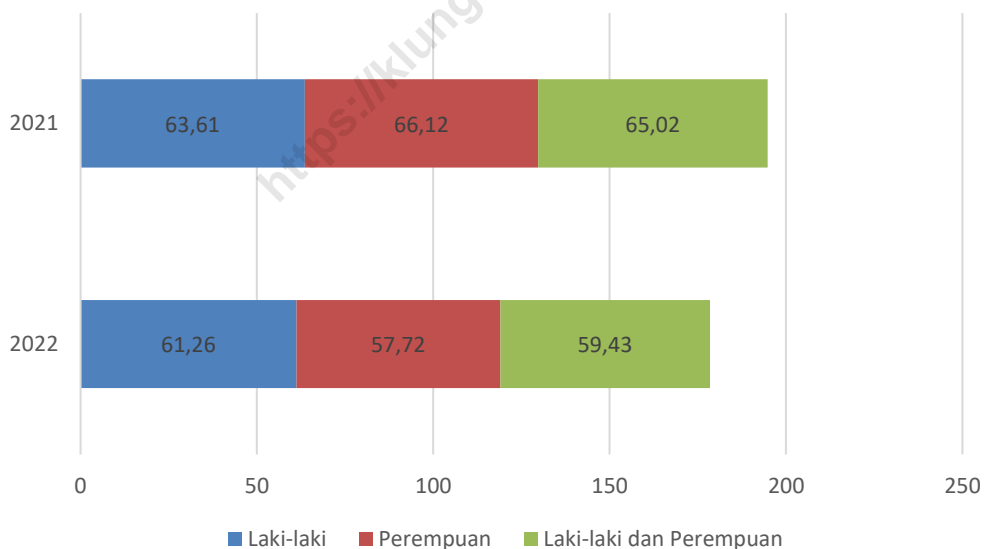
Grafik II.2 Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Klungkung, 2021 - 2022



Indikator kesehatan yang mendapatkan perhatian selain masalah keluhan adalah keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas. Indikator ini didefinisikan sebagai Angka Kesakitan atau Angka Morbiditas. Angka ini didefinisikan sebagai

gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

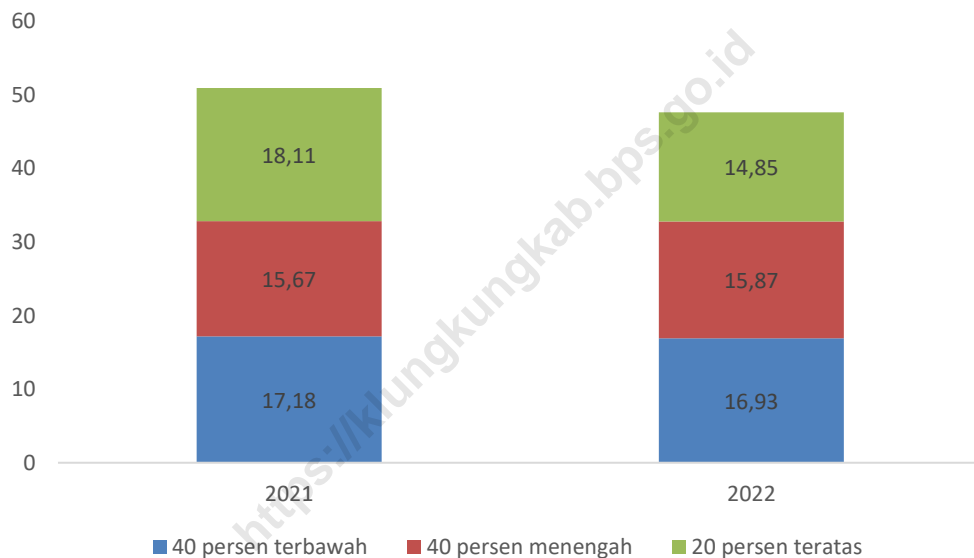
Grafik II.3 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk berobat jalan di Kabupaten Klungkung, 2021 dan 2022



Penurunan pada persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan di lain pihak juga diikuti dengan penurunan persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Pada tahun 2022 tercatat hanya 59,43 persen yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Persentase ini menurun

dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 65,02 persen. Tidak hanya dari sisi keseluruhan, proporsi menurut jenis kelamin juga mengalami perubahan. Tercatat persentase laki-laki yang menggunakan jaminan kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase penduduk laki-laki yang menggunakan jaminan kesehatan juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

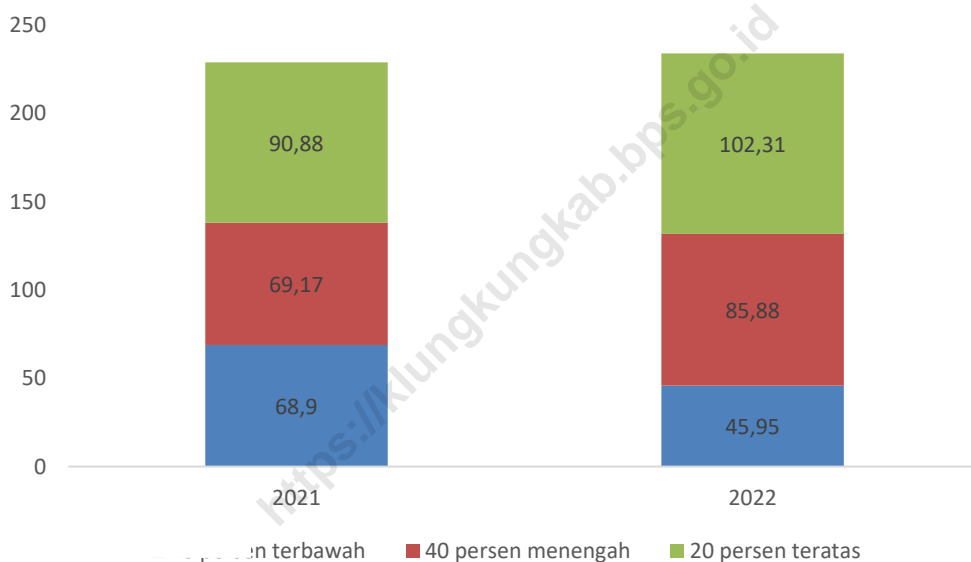
Grafik II.4 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin yang Merokok Menurut Karakteristik Pendapatan di Kabupaten Klungkung, 2021 dan 2022



Isu yang berkaitan dengan kesehatan seringkali dihubungkan dengan gaya hidup merokok. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronchitis, pneumonia. Merokok dan perokok adalah dua indikator yang dalam jangka panjang diharapkan terus mengalami penurunan. Persentase penduduk yang merokok di tahun 2022 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 untuk hampir semua kelompok pendapatan kecuali kelompok 40 persen menengah. Bahkan pada kelompok 20 persen teratas penurunan tercatat paling tinggi yaitu dari 18,11 persen menjadi 14,85 persen.

Di sisi lain, penurunan persentase ini tidak diikuti dengan rata-rata konsumsi rokok. Rata-rata konsumsi rokok tercatat mengalami kenaikan terutama untuk kelompok 40 persen menengah yang konsumsi per batangnya mengalami kenaikan dari sekitar 69 batang per minggu menjadi hampir 86 batang per minggu. Konsumsi pada kelompok terbaawah di sisi lain mengalami penurunan dari sekitar 69 batang menjadi 46 batang per minggunya.

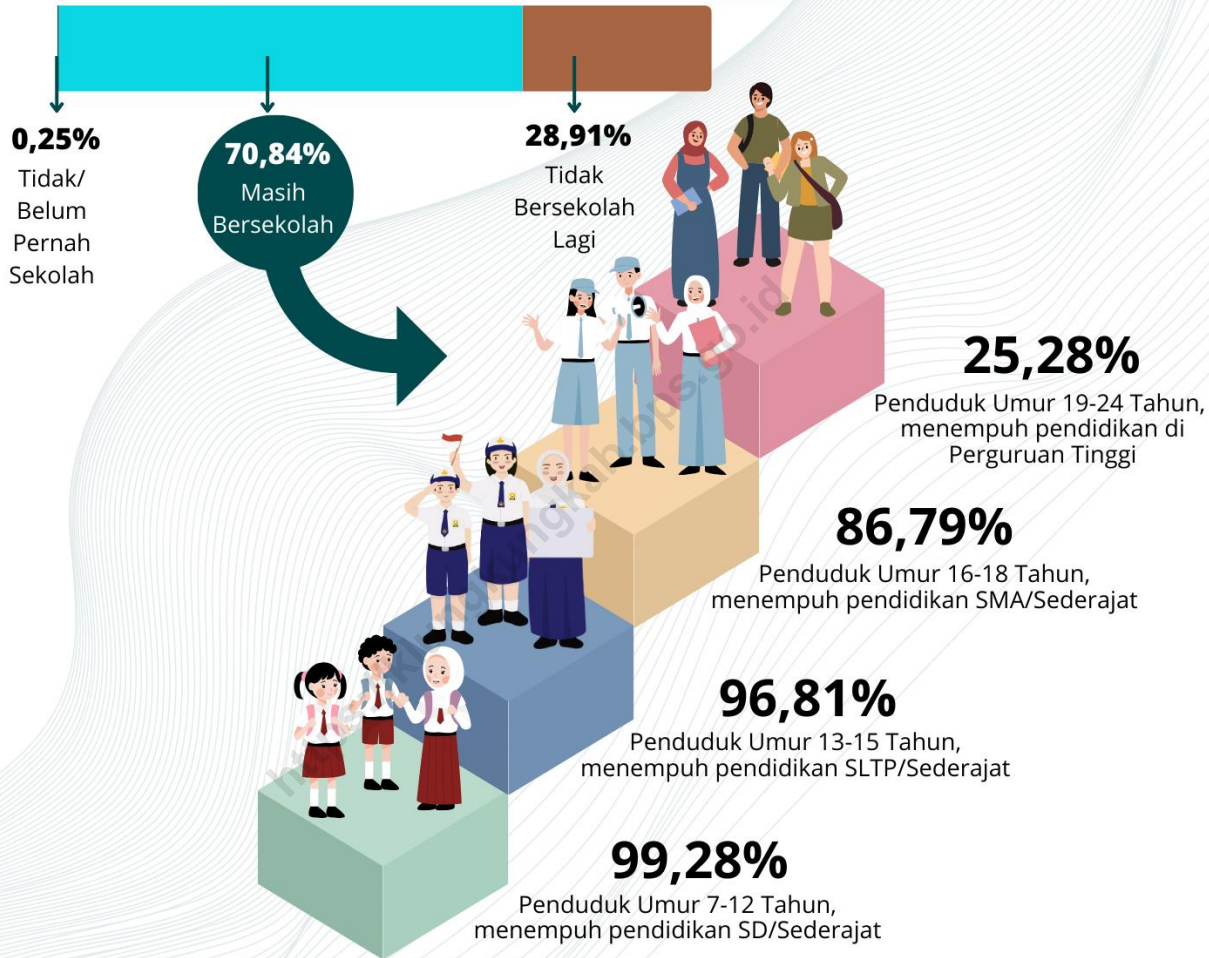
Grafik II.5 Rata-rata Konsumsi Rokok Menurut Karakteristik Pendapatan di Kabupaten Klungkung, 2021 dan 2022



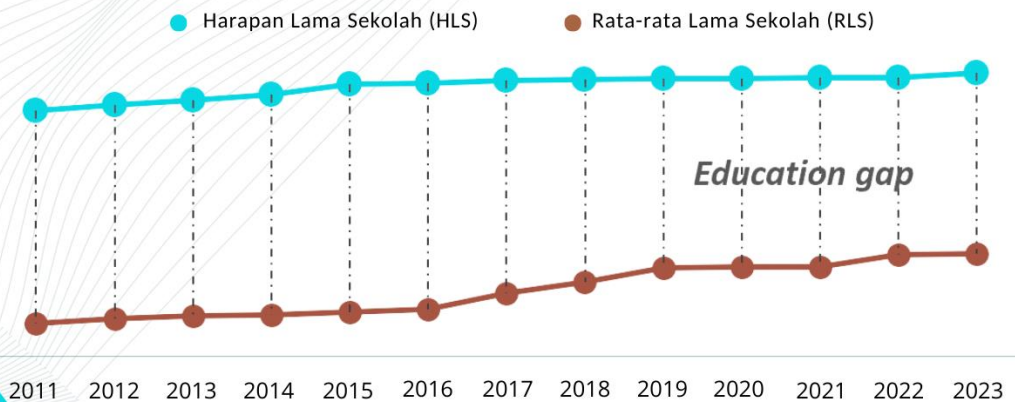
PENDIDIKAN



Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Klungkung, 2022



Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (SLS) Kabupaten Klungkung, 2011-2023

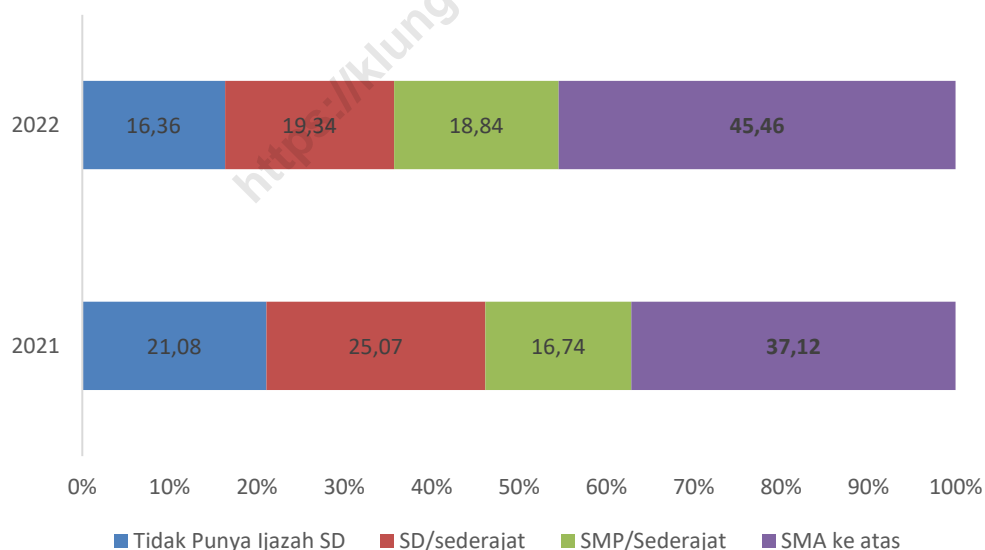


BAB III PENDIDIKAN

III.1 Pendidikan

Untuk mengetahui kualitas penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Pada tahun 2021, sebagian besar pendidikan penduduk di atas 15 tahun adalah tamat SD/Sederajat. Dilihat dari kualitasnya, pendidikan penduduk laki-laki di Klungkung relatif lebih baik dibandingkan dengan penduduk perempuan. Persentase penduduk perempuan yang tidak pernah sekolah maupun pernah akan tetapi tidak tamat sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun, persentase yang menamatkan pendidikan Akademi/Diploma III ke atas untuk penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

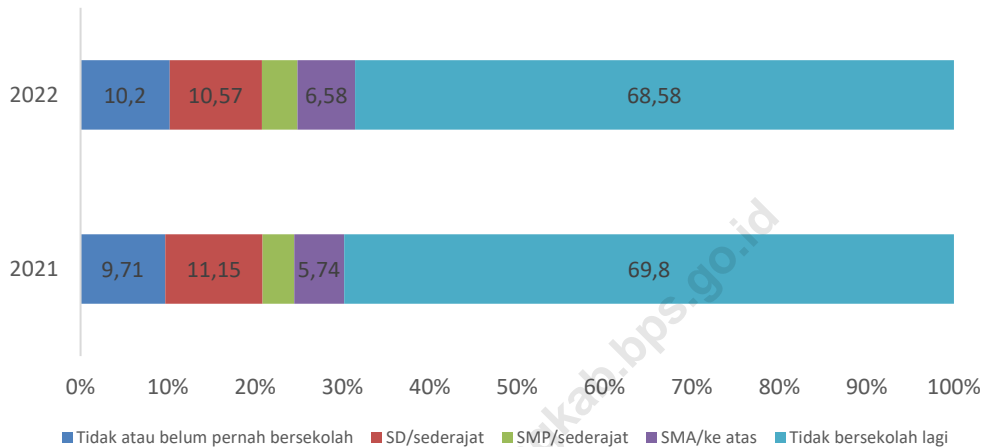
Grafik III.1 Penduduk 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021 - 2022



Dilihat dari proporsi penduduk di atas 15 tahun ke atas terjadi pergerakan yang negatif pada tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Klungkung yaitu semakin tingginya penduduk yang tidak memiliki ijazah SD. Kenaikan pada jumlah penduduk yang tidak memiliki ijazah SD diikuti dengan penurunan pada kelompok dengan pendidikan SMA

ke atas. Penduduk dengan pendidikan SMA ke atas proporsinya mengalami penurunan dari 45,46 persen menjadi 37,12 persen.

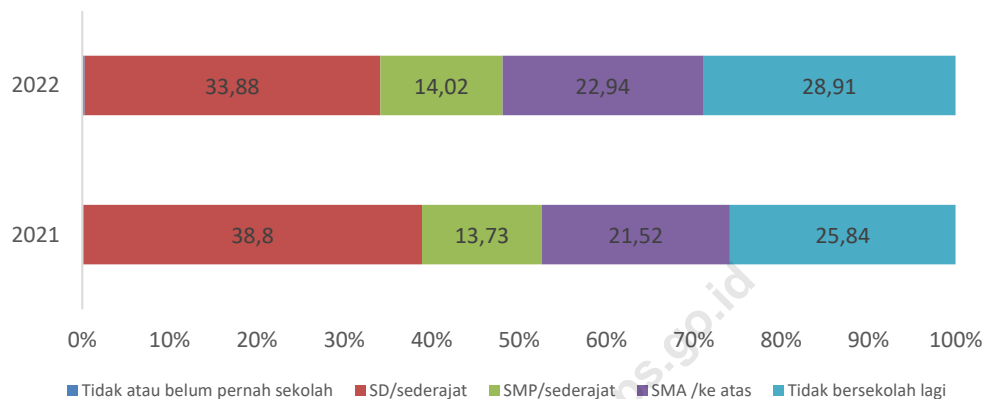
Grafik III.2 Penduduk 5 Tahun Ke Atas Berdasarkan Status Pendidikan, 2021 - 2022



Kondisi ini tidak jauh berbeda apabila dilihat pada penduduk 5 tahun ke atas dan status pendidikannya. Persentase penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah meningkat dari 9,71 persen di tahun 2021 menjadi 10,2 persen di tahun 2022. Di lain pihak kondisi yang tercatat mengalami perbaikan adalah meningkatnya persentase penduduk yang sedang duduk di bangku SMA ke atas. Persentase kelompok ini meningkat dari 5,74 persen menjadi 6,58 persen.

Analisis mengenai status pendidikan kemudian dapat lebih dispesialisasi menurut kelompok usia tertentu yang diharapkan merupakan kelompok yang memiliki kemungkinan paling besar untuk bersekolah yaitu kelompok usia 7 - 24 tahun. Pada kelompok penduduk ini terjadi kenaikan pada persentase penduduk yang mengenyam pendidikan SMP/ sederajat atau SMA/ sederajat. Perentase penduduk yang mengenyam pendidikan SD/ sederajat meningkat dari 13,73 persen menjadi 14,02 persen sementara persentase penduduk dengan status pendidikan SMA/ sederajat mengalami kenaikan dari 21,52 persen menjadi 22,94 persen. Sisi yang tidak cukup positif dari sisi pendidikan adalah meningkatnya persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi yang persentasenya meningkat dari 25,84 persen menjadi 28,91 persen di tahun 2022.

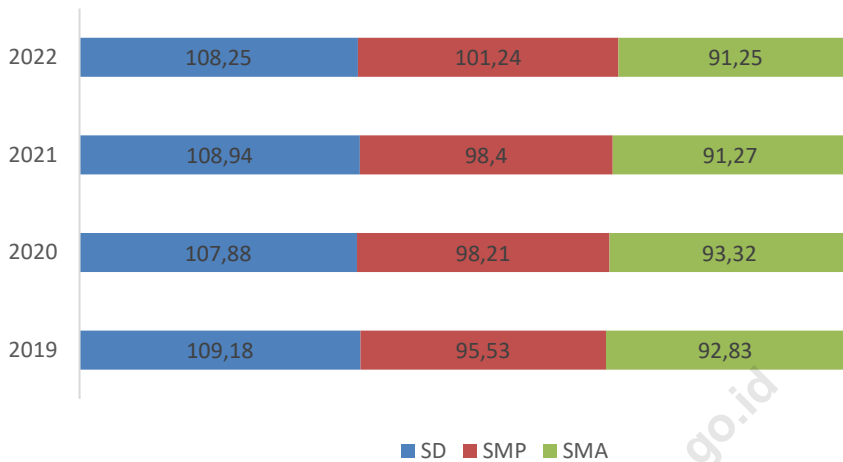
Grafik III.3 Penduduk 7 - 24 Tahun Ke Atas Berdasarkan Status Pendidikan,
2021 - 2022



APK merujuk pada rasio perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu yang tanpa memperhatikan batasan umurnya dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sesuai dengan kelompok umur pada jenjang/tingkat pendidikannya. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Misalnya kita akan menghitung APK untuk SD, maka kita akan membandingkan jumlah penduduk yang bersekolah di SD dibandingkan dengan penduduk pada kelompok umur 7 - 12 tahun. Perbedaan pengukuran ini dengan APS tentu saja akan memberi hasil yang berbeda. Secara langsung perbedaan yang timbul akan memberi gambaran pada relevansi usia sekolah di luar kelompok umur yang ditentukan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

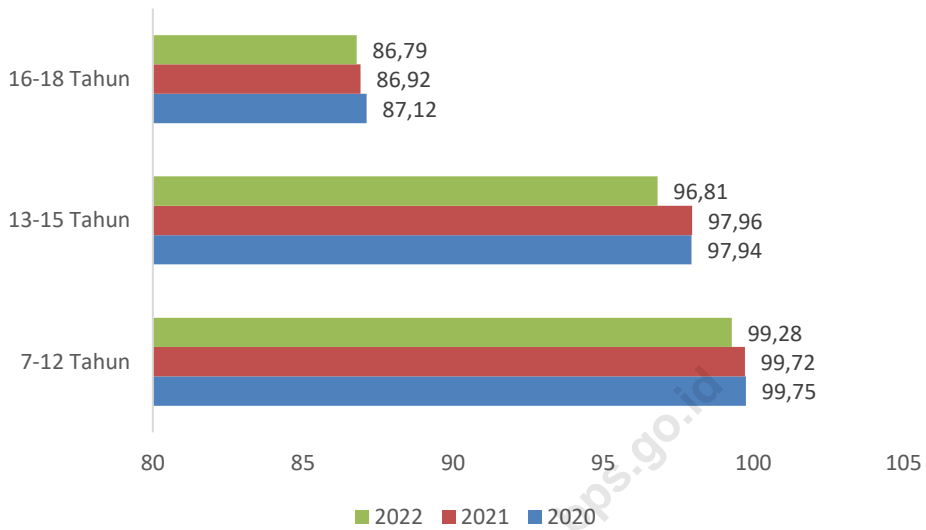
Grafik III.4 APK Kabupaten Klungkung Menurut Kelompok Umur, 2019 - 2022



Untuk kelompok SD, APK menurun dari 108,94 persen menjadi 108,25 persen. Di sisi lain, peningkatan tercatat pada kelompok SMP meningkat dari 98,21 persen menjadi 101,24 persen. Sementara itu, pada kelompok SMA mengalami penurunan dari 93,32 menjadi 91,25 persen.

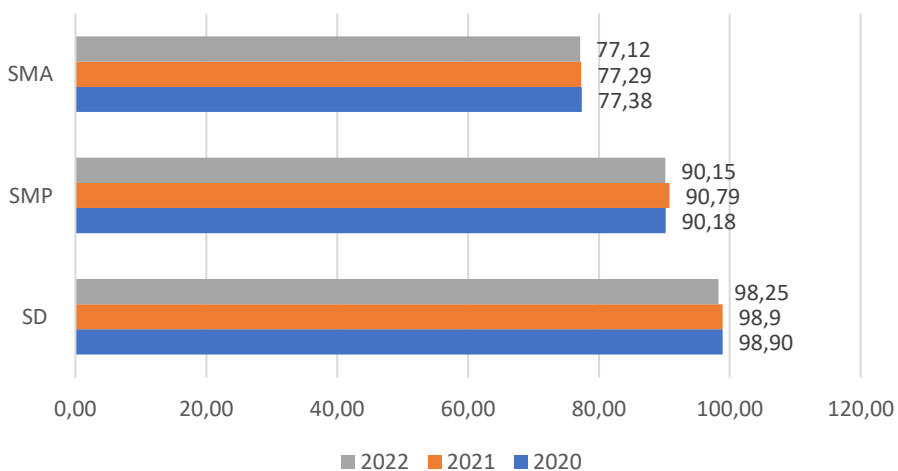
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan penduduk usia sekolah. APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun) dan SMU (16-18 tahun). Secara umum Angka partisipasi Sekolah (APS) SD lebih tinggi dari SLTP dan SLTA. Hal ini sangatlah wajar, mengingat Program wajib belajar hanya sampai batas 9 tahun saja, sehingga APS SLTA jauh lebih rendah dari APS level dibawahnya. Namun yang menggembirakan adalah pada semua jenjang pendidikan angka APS mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun belakangan. Mengkaji lebih mendalam tentang APS, berikut disajikan angka partisipasi sekolah (APS) dibedakan menurut tingkat atau jenjang pendidikan, dalam hal ini APS menurut kelompok usia sekolah yaitu 7-12 tahun (tingkat SD), 13-15 tahun (tingkat SLTP) dan 16-18 tahun (tingkat SMU/SMK).

Grafik III.5 APS Kabupaten Klungkung Menurut Kelompok Umur, 2020 - 2022



Di tahun 2022, APS Klungkung tercatat mengalami penurunan untuk semua kelompok umur. Kelompok umur 7-12 tahun menurun dari 99,72 persen menjadi 99,28 persen sementara 16-18 tahun tercatat menurun dari 86,92 persen menjadi 86,79 persen. Kelompok umur 13 - 15 tahun tercatat mengalami penurunan paling tinggi dari 97,96 persen menjadi 96,81 persen.

Grafik III.6 APM Kabupaten Klungkung Menurut Tingkat Pendidikan, 2020 - 2022



APM dikenal juga sebagai *Net Enrollment Ratio* (NER). Istilah APM merujuk pada perbandingan jumlah penduduk pada kelompok umur tertentu yang bersekolah di jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk di kelompok umur tersebut. Andaikan kita akan menghitung APM pada SD, maka kita akan membandingkan antara jumlah penduduk di kelompok umur 7 - 12 yang bersekolah SD dengan keseluruhan penduduk yang berusia 7 - 12 tahun. Secara spesifik APM dapat digambarkan sebagai irisan dari APS dan APK dengan pembagi adalah penduduk pada suatu kelompok umur. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Seperti halnya APS, APM di tahun 2022 juga tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. APM SD tercatat turun dari 98,90 persen menjadi 98,25, SMP tercatat turun dari 90,79 persen menjadi 90,15 persen sementara SMA tercatat turun dari 77,29 persen menjadi 77,12 persen.

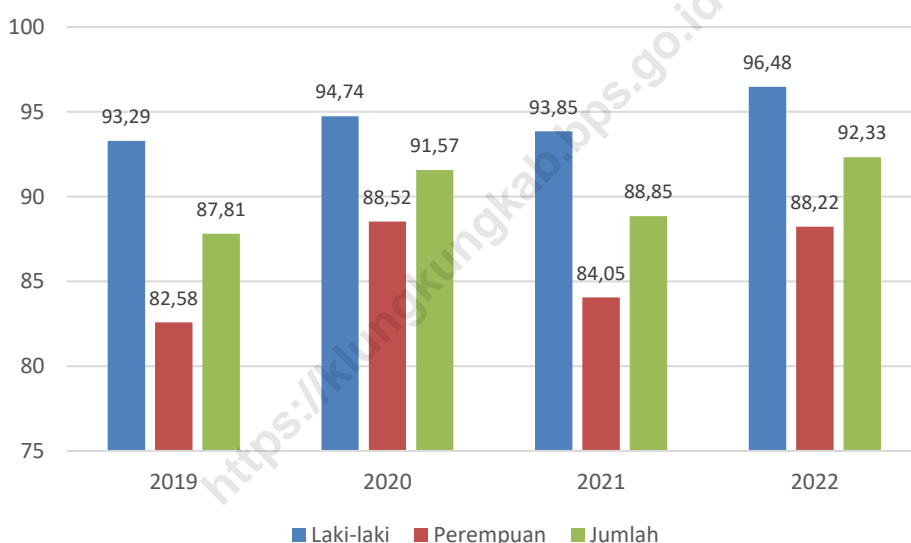
Sangat menarik sekali membandingkan fenomena-fenomena yang terciptakan dari angka partisipasi ini. Secara menyeluruh ketiga indikator ini merefleksikan bahwa probabilitas untuk menjalani spesialisasi dalam pekerjaan masih bisa dikatakan kecil pada kelompok-kelompok umur usia muda. Hanya saja kendala-kendala yang berujung pada permasalahan perekonomian maupun hambatan-hambatan spasial adalah sesuatu yang mungkin sangat sulit untuk diselesaikan. Fenomena APS masih menjadi perhatian untuk kelompok perguruan tinggi. Seperti halnya APK, APS untuk kelompok perguruan tinggi sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa penduduk di Bali sudah mulai melepaskan tanggung jawabnya untuk bersekolah menjadi bekerja setelah usia 18 tahun ke atas. Peningkatan pada APM di kelompok perguruan tinggi bahkan hanya sebesar 0,07 persen.

Angka Melek Huruf (AMH) diartikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari dibandingkan dengan seluruh penduduk di wilayah itu. Karena merupakan persentase terhadap keseluruhan terhadap keseluruhan penduduk dalam penghitungannya angka melek huruf tidak akan pernah melebihi nilai 100. Saat ini permasalahan yang muncul adalah memberantas masalah buta huruf yang terjadi pada golongan usia tua. Pertimbangan-pertimbangan subyektif seperti halnya tidak ada relevansinya dengan pekerjaan, rasa malas, kesulitan adaptasi dalam belajar adalah salah

satu hambatan dalam program pengentasan untuk kelompok ini. Di sisi lain tentu saja prioritas bagi mereka adalah golongan usia muda yang dirasa lebih memerlukan.

Angka melek huruf (AMH) itu sendiri pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta untuk menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Grafik III.7 AMH Kabupaten Klungkung Menurut Jenis Kelamin, 2019 - 2022

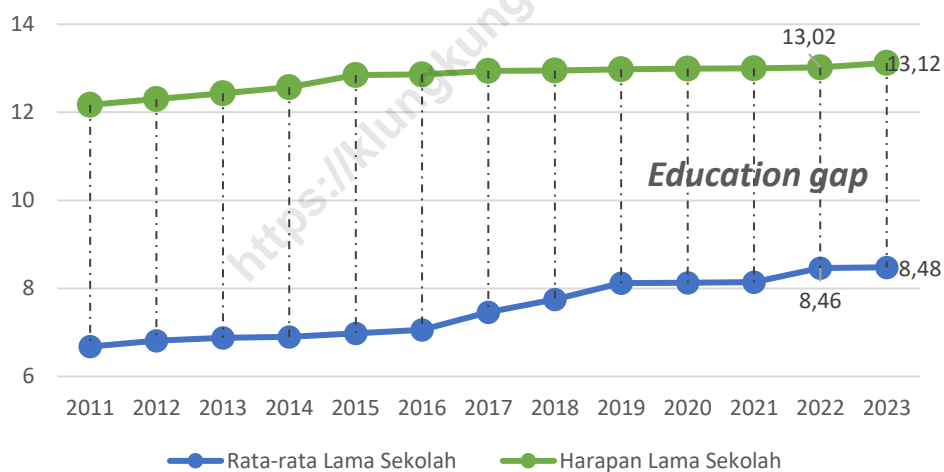


Permasalahan yang menjadi perhatian terkait AMH seringkali pada perbedaan menurut jenis kelamin. Secara total AMH di Kabupaten Klungkung tahun 2021 mencapai 88,85 persen menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 91,57 persen. AMH laki-laki tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. AMH laki-laki di tahun 2021 mencapai 93,85 persen sementara perempuan mencapai 84,05 persen.

Indikator pendidikan juga dapat dilihat capaian pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam IPM, indikator pendidikan diwakili oleh dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,02 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,02 tahun atau setara dengan Diploma I. Sementara itu RLS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Grafik III.8 HLS dan RLS Kabupaten Klungkung, 2010 - 2023



Pada tahun 2022, RLS Kabupaten Klungkung tercatat selama 8,48 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan dasar yang lamanya 9 tahun. Selain itu capaian pendidikan di tahun ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 8,46 tahun. Rendahnya peningkatan pada RLS di satu sisi menunjukkan bahwa tidak banyak yang berubah dari tingkat penduduk dengan usia di atas 25 tahun. Ada beberapa situasi umum yang memungkinkan hal ini terjadi seperti misalnya rendahnya migrasi masuk penduduk

dengan pendidikan tinggi atau sebaliknya terjadi migrasi keluar dan menetap dari penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini juga tercermin dari tidak banyaknya struktur lapangan usaha yang berkontribusi pada perekonomian. Ekonomi Klungkung dalam beberapa tahun terakhir masih didominasi pertanian meskipun dari sisi jasa secara perlahan sudah menunjukkan progres yang meningkat.

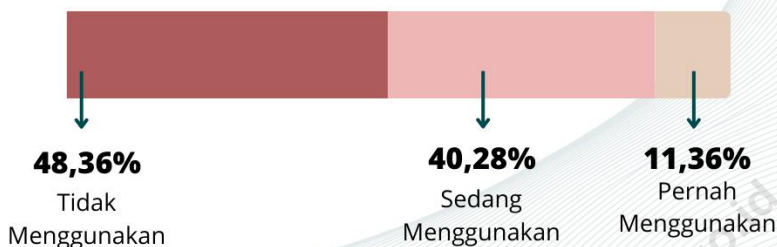
Selain RLS, angka HLS juga meningkat sangat kecil yaitu 0,1 tahun dari 13,02 tahun ke 13,12 tahun. HLS selama 13,12 tahun dapat disetarakan dengan pendidikan Diploma I atau dua semester awal dari jenjang pendidikan yang lebih lama (misalnya D3, S1). HLS ini menunjukkan bahwa capaian lamanya sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh penduduk usia 7 tahun ke atas adalah sekitar 13,12 tahun atau menamatkan Diploma I. Melambatnya pertumbuhan dari HLS secara teori dapat menunjukkan bagaimana jenis pendidikan siap kerja setingkat diploma sangat potensial bagi peningkatan taraf edukasi dan literasi penduduk di Kabupaten Klungkung.

Perbedaan pergerakan atau *gap* antara RLS dan HLS di lain pihak dapat kita gunakan untuk mengamati kesenjangan pendidikan antar kelompok umur penduduk. Kenaikan dalam poin yang sama antara RLS dan HLS telah membuat *educational gap* di Klungkung juga cenderung tetap. Stagnasi ini berarti bahwa meskipun HLS terus meningkat, proporsi penduduk usia 23 dan 24 tahun yang bersekolah cenderung sangat kecil sehingga di tahun berikutnya perubahan pada HLS tidak terlalu berpengaruh pada meningkatnya RLS.

FERTILITAS

4

Status Penggunaan Alat/Cara KB Perempuan Usia 15-49 Tahun Pernah Kawin di Kabupaten Klungkung, 2022



12,9%
Pelayanan KB RS



3,2%
Tim KB Keliling



83,90%
Klinik KB



Banyaknya Sarana Keluarga Berencana



Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Metode Kontrasepsi yang Digunakan Kabupaten Klungkung, 2022



2,09%
Kondom



10,53%
Susuk KB/Implan



0,35%
MOW/Tubectomy



6,56%
MOP/Vasectomy



29,37%
IUD/AKDR/spiral



42,99%
Suntikan



8,11%
Pil

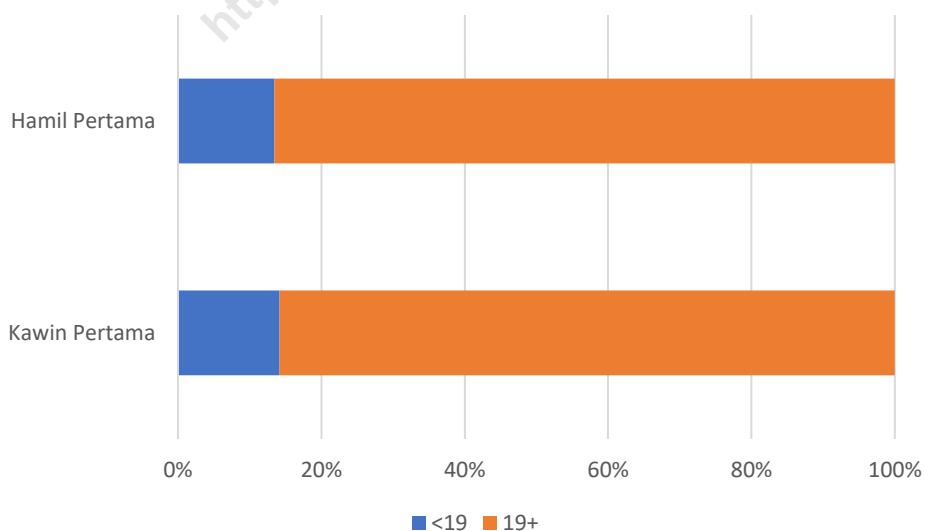
BAB IV

FERTILITAS

IV.1 Fertilitas dan Kontrasepsi

Fertilitas adalah masalah yang masih umum ditemui di negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Fertilitas menjadi masalah karena di negara berkembang dengan tingkat produktivitas penduduk yang tidak seragam dan cenderung rendah, penambahan penduduk masih merupakan beban pembangunan. Ruang diskusi mengenai fertilitas kemudian dibawa ke studi demografi yang lebih luas yang kemudian mampu memberikan dampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat fertilitas penduduk. Penanganan masalah fertilitas kemudian berlanjut dari pemberian insentif ke khalayak umum (KB) menjadi edukasi reguler yang menunjukkan pentingnya menjaga jumlah anak yang dilahirkan sehingga semua orang bisa mempertahankan kualitas dalam mengasuh mereka di kemudian hari.

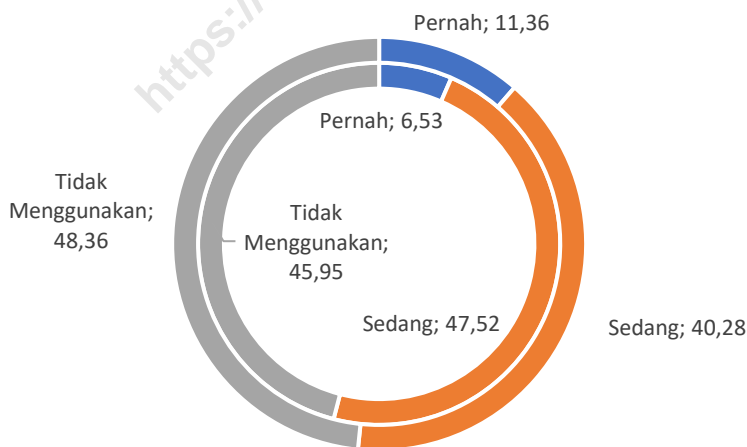
Grafik IV.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Usia Perkawinan Pertama dan Kehamilan Pertama, 2022



Analisis mengenai fertilitas tidak bisa dilepaskan dari studi mengenai usia kawin pertama seorang ibu. Tidak sedikit di Indonesia, dengan tidak berlakunya legalitas aborsi telah mendorong sebagian kaum perempuan menikah di usia dini karena kehamilan. Data menunjukkan bahwa sekitar 14,17 persen kaum perempuan di Klungkung menikah di usia di bawah 19 tahun. Usia menikah ini tentunya sangat rawan untuk kesehatan si perempuan. Terdapat kemungkinan mereka menikah ketika belum menamatkan pendidikan SLTA. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa angka partisipasi pendidikan wanita di Klungkung relatif lebih rendah dibandingkan kaum laki-laknya.

Hal senada juga dapat dilihat pada usia kehamilan pertama. Sekitar 13,44 persen perempuan di Klungkung, mengalami kehamilan pertamanya pada usia di bawah 19 tahun. Hal tersebut perlu dijadikan perhatian bagi pendidikan perempuan mengingat dalam kondisi hamil praktis mereka tidak akan bisa bersekolah lagi atau kemungkinan dilanjutkan dengan program kejar paket pada jenjang yang disesuaikan.

Grafik IV.2 Persentase Perempuan Usia 15 - 49 Tahun Pernah Kawin Berdasarkan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2021 dan 2022



Masalah fertilitas tentu tidak bisa dipisahkan dari masalah penggunaan alat atau cara KB. Tingginya penggunaan alat kontrasepsi biasanya akan efektif dalam mengontrol tingkat kelahiran yang tidak terencana. Di Klungkung pada tahun 2022, 11,36 persen perempuan 15 - 49 tahun pernah kawin pernah menggunakan KB, sementara itu hampir

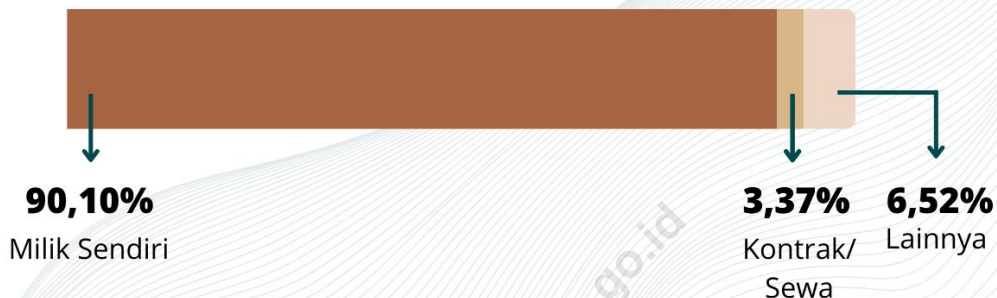
40,28 persen sedang menggunakan alat/cara KB sementara sisanya sekitar 48,36 persen tidak pernah menggunakan. Dari pengguna KB aktif, 15,35 persennya pernah berhenti/berganti alat/cara KB.

<https://klungkungkab.bps.go.id>

PERUMAHAN



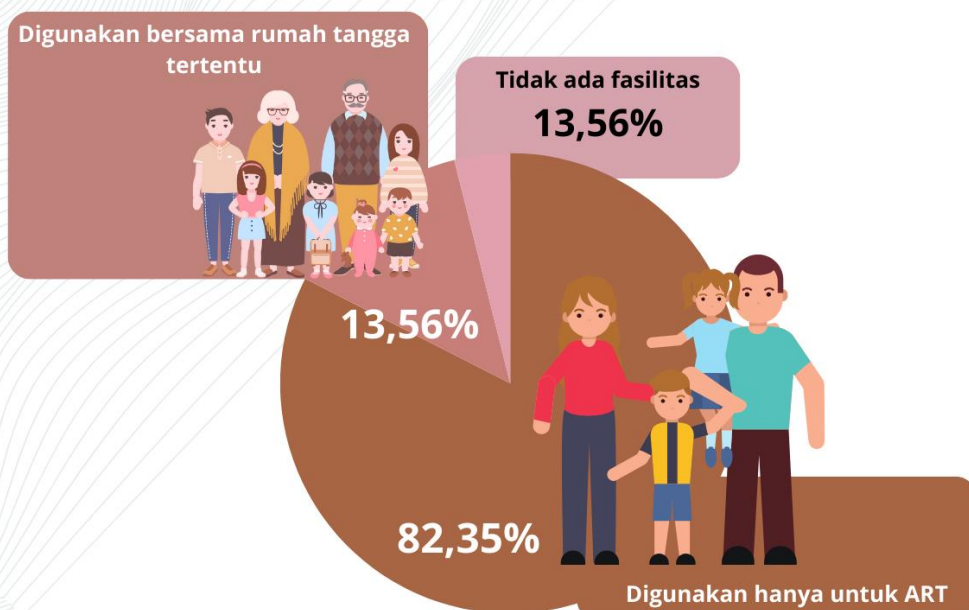
Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Klungkung, 2021



Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga di Kabupaten Klungkung, 2021



Fasilitas Tempat BAB Rumah Tangga di Kabupaten Klungkung, 2021



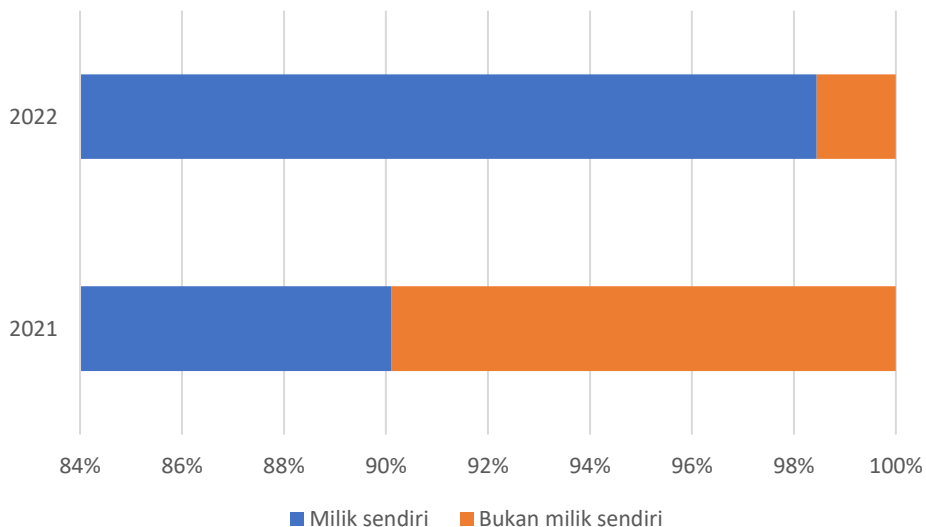
BAB V

PERUMAHAN

V.1 Bangunan Tempat Tinggal

Masalah kualitas hidup seseorang tidak terlepas dari kondisi tempat tinggalnya. Tidak hanya di pedesaan, yaitu perumahan dihadapkan pada kondisi bangunan tidak layak huni akan tetapi juga di perkotaan yang cenderung berkaitan dengan lingkungan kumuh dan padat. Kedua kondisi tersebut pada dasarnya akan membawa alur yang sama dimana sangat menentukan kesehatan manusia yang hidup di dalamnya. Semakin jauhnya jurang pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan telah membuat semakin banyak pencari kerja di wilayah perkotaan. Hal tersebut akan berdampak pada permintaan perumahan di perkotaan yang semakin tinggi dan ketersediaan luas lahan yang semakin berkurang. Menurut beberapa peneliti apabila kondisi tersebut terus berlanjut maka akan berdampak pada semakin meluasnya wilayah perkotaan dan menyempitnya wilayah pedesaan serta semakin tingginya komuter antar wilayah yang membuat ekonomi berjalan tidak efisien.

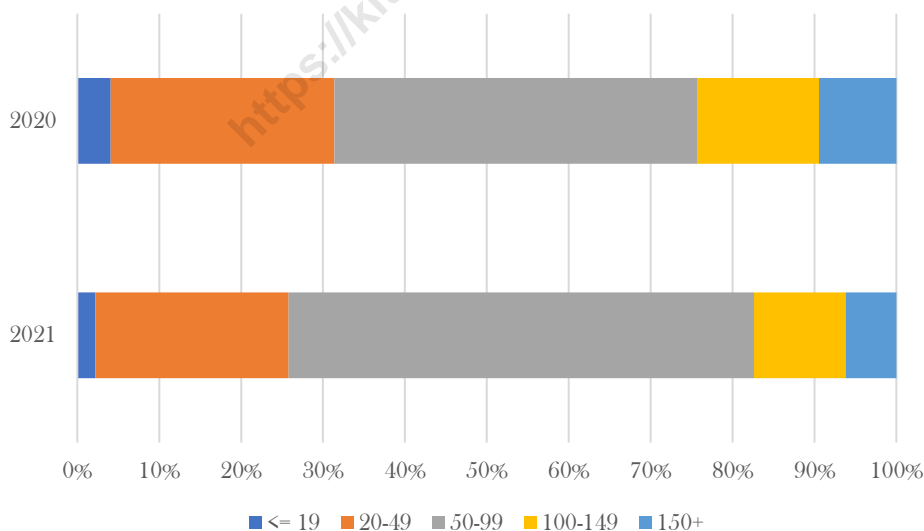
Grafik V.1 Persentase Bangunan Tempat Tinggal Menurut Status Kepemilikan, 2021 dan 2022



Kondisi perumahan bisa dilihat dari berbagai hal beberapa diantaranya adalah kondisi fisik, penerangan, air bersih dan juga status kepemilikannya. Berdasarkan status kepemilikannya, lebih dari 90 persen status kepemilikan bangunan tempat tinggal adalah milik sendiri. Penggunaan bangunan dengan status kontrak atau sewa hanya sekitar 3,37 persen sementara dengan status lainnya mencapai 6,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi real estat di Kabupaten Klungkung relatif mengalami penurunan di tahun ini sementara dari penyewaan akomodasi cenderung mengalami kenaikan.

Tingginya status kepemilikan bangunan miliki sendiri di sisi lain memiliki korelasi dengan luas bangunan yang ditempati oleh rumah tangga itu sendiri. Pada tahun 2021, lebih dari 50 persen rumah tangga di Klungkung menempati bangunan tempat tinggal dengan luas antara 50 -99 m² ke atas. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan laus antara 50-99 m² ke atas semakin bertambah banyak dengan peningkatan sebesar 12,45 persen.

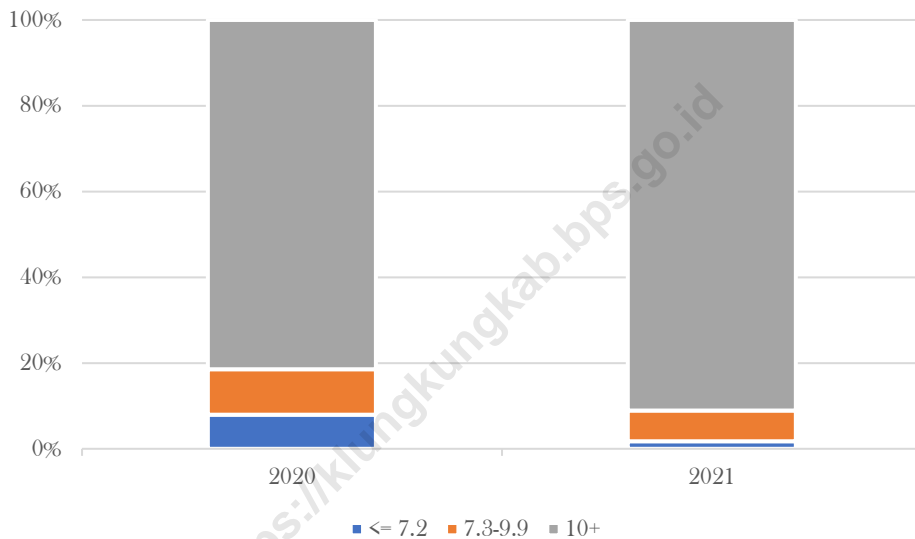
Grafik V.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal (m²), 2020-2021



Dengan asumsi sekitatr 4 anggota dalam suatu rumah tangga, luas bangunan tempat tinggal di Klungkung secara umum sudah dapat dikatakan memadai. Hal ini tercermin dari luas lantai per kapita yang sebagian besarnya di atas 10 m². Sebagian besar anggota

rumah tangga atau dengan persentase 91,05 persen menempati luas lantai di atas 10 m². Sementara itu hanya sekitar 8,95 persen yang menempati luas lantai di bawah itu. Apabila dilihat lebih jauh, maka dapat dilihat bahwa hanya 1,78 persen yang tinggal pada bangunan dengan luas lantai di bawah 7,2 m².

Grafik V.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita, 2020-2021



Menurut tim kesehatan, definisi atap yang layak yang selama ini digunakan, yaitu atap yang terbuat dari beton, genteng, sirap, seng, dan asbes adalah kurang tepat, mestinya asbes tidak dianggap sebagai atap yang layak, hal ini mengingat bahayanya partikel-partikel dari asbes bagi paru-paru, utamanya terkait penyakit ISPA. Di Klungkung pada tahun 2021, hanya 3,82 persen rumah tangga yang memiliki atap dari asbes. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan persentase rumah tangga yang atapnya dari genteng yang mencapai 92,55 persen. Dilihat dari dindingnya, sekitar 99,21 persen bangunan tempat tinggal di Klungkung sudah memiliki tembok permanen.

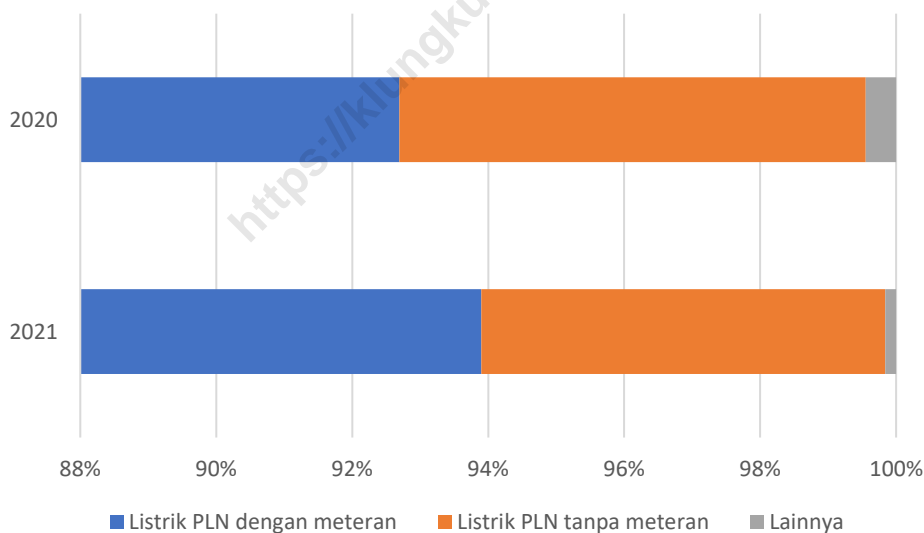
Di bagian lantai sudah sekitar 79,04 persen rumah tangga yang menggunakan keramik. Bahan bangunan lain yang digunakan selain keramik adalah semen atau bata merah yang persentasenya mencapai 16,48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi bangunan rumah di Kabupaten Klungkung sudah sangat layak huni.

V.2 Sumber Penerangan

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat.

Dilihat dari sumber penerangannya, sekitar 93,90 persen rumah tangga sudah mendapatkan listrik PLN dengan meteran. Persentase listrik PLN tanpa meteran mengalami penurunan dari 6,86 persen menjadi 5,94 persen. Di lain pihak persentase penggunaan lainnya mencapai 0,16 persen.

Grafik V.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2020-2021



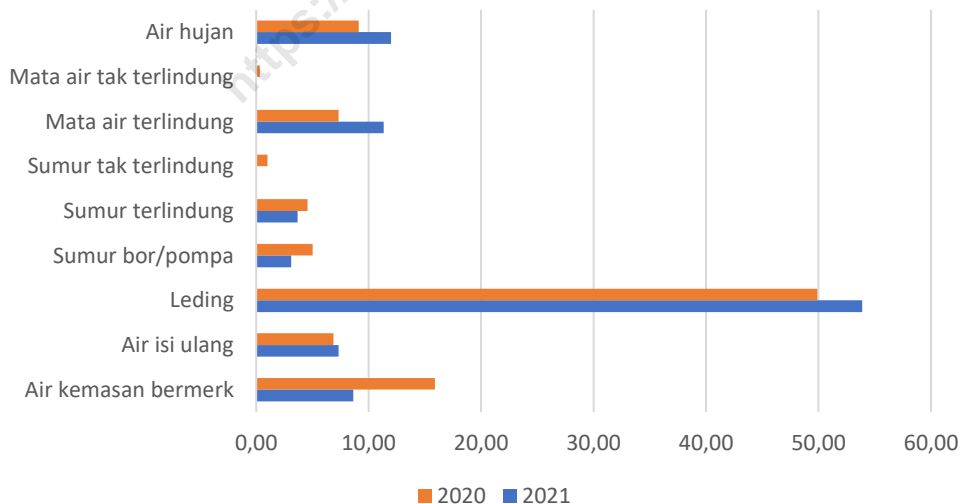
V.3 Sumber Air Minum

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya

minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Dilihat dari sumber air utama yang digunakan untuk minum tercatat bahwa sebagian besar menggunakan leding meteran. Kelompok lain menggunakan air kemasan bermerek atau isi ulang.

Grafik V.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama, 2020-2021

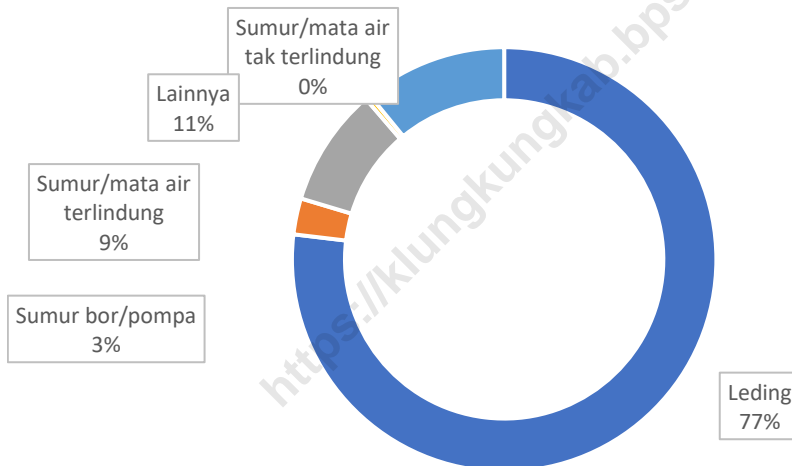


Sesungguhnya konsep sumber air minum dibedakan menjadi dua yaitu air minum bersih dan air minum layak. Air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak

ke tempat penampungan akhir tinja ≥ 10 m. Sementara itu, air minum layak terdiri dari leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja ≥ 10 m.

Hanya saja melihat kelayakannya sendiri, persentase sumber air minum layak di Klungkung kemungkinan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan, jika dilihat dari sumber air minum seperti sumur maupun mata air ke fasilitas pembuangan limbah/kotoran/tinja terdekat. Jarak sumber air minum ini idealnya atau lebih tepatnya layaknya di atas 10 meter.

Grafik V.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Mandi/Cuci/dll, 2022



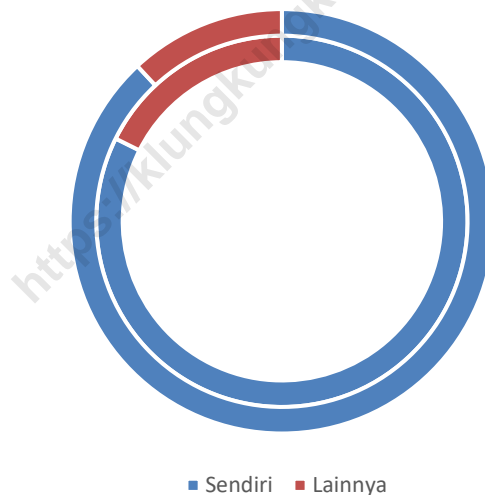
Sebagian besar penduduk Klungkung, menggunakan leding meteran untuk mandi, cuci dan lainnya. Persentasenya mencapai lebih dari tiga per empatnya. Selain leding sumur/mata air terlindung menjadi pilihan lain dengan persentase mencapai 9 persen. Selain kedua sumber ini, sebagian penduduk utamanya di Nusa Penida memanfaatkan air hujan (10,92 persen) untuk aktivitas ini.

V.4 Fasilitas Buang Air dan Bahan Bakar

Sarana pembuangan kotoran atau fasilitas buang air besar merupakan salah satu indikator sanitasi yang menurut Departemen Kesehatan merupakan faktor penilaian

untuk rumah sehat selain ketersediaan air bersih. Dengan fasilitas tempat buang air besar dengan penampungan limbah yang memenuhi syarat kesehatan, rumah tangga akan terhindar dari penyakit. Indikator ini digunakan untuk pengukuran akses sanitasi layak, akses sanitasi aman, dan persentase praktik buang air besar sembarangan yang sangat penting untuk mengetahui tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik terkait tingkat kesehatan masyarakat dan gambaran pencemaran air dari sumber air limbah domestik. Pengukuran persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan menggunakan air dan sabun memberikan gambaran mengenai perilaku masyarakat yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Grafik V.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2021-2022

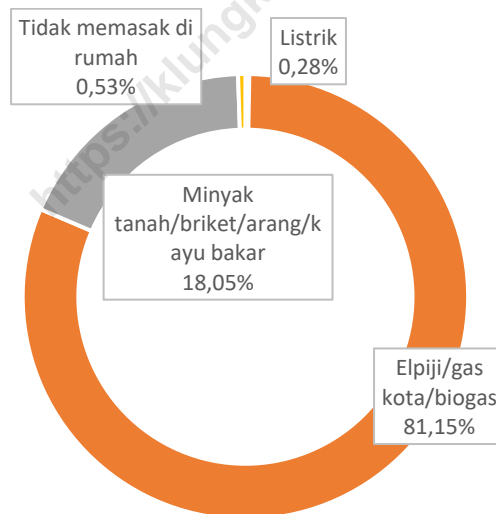


Pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang buang air dengan milik sendiri mencapai 88,07 persen atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 82,35 persen. atau menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 85,41 persen. Sementara itu, persentase tempat buang air besar yang digunakan beberapa rumah tangga mengalami kenaikan. Hal positif lain adalah menurunnya persentase rumah tangga yang tidak memiliki tempat buang air besar yang menurun dari 4,75 persen

menjadi 3,91 persen. Apabila dilihat dari jenis klosetnya maka dapat dilihat bahwa seluruhnya sudah menggunakan model leher angsa.

Selain terkait dengan sanitasi dan fisik bangunan, kajian mengenai perumahan tidak terlepas dari penggunaan sumber energi yang digunakan oleh rumah tangga. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber energi juga terkadang berhubungan dengan tingkat ekonomi suatu rumah tangga keluarga. Sumber energi yang menjadi konteks dalam penelitian ini adalah sumber energi listrik. Semakin sejahtera sebuah rumah tangga maka semakin tinggi konsumsi listrik maupun bahan bakar lainnya. Gap penggunaan bahan bakar akan semakin luas ketika memperhitungkan bahan bakar untuk Transportasi. Hal ini juga diperjelas dalam bentuk kebikajan, subsidi energi lebih banyak mengarah pada rumah tangga dengan tingkat penggunaan energi paling rendah.

Grafik V.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak, 2021

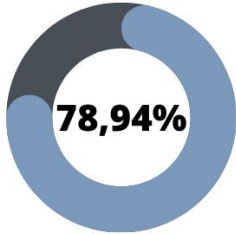


BPS saat ini belum merilis data penggunaan energi listrik menurut rumah tangga. Ketersediaan data mengenai penggunaan energi dalam rumah tangga masih hanya pada jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak. Data BPS menunjukkan bahwa penetrasi elpiji 3 kg sebagai bahan bakar memasak telah lebih dari tiga perempatnya atau

sekitar 81,15 persen. Di Klungkung penggunaan listrik untuk memasak masih dilakukan oleh sekitar 0,28 persen rumah tangga dan sekitar 0,53 persennya tidak melakukan aktivitas memasak di rumah. Yang menjadi perhatian adalah penggunaan konsumsi bahan bakar dalam bentuk minyak tanah/briket/arang/kayu bakar yang persentasenya mencapai 18,05 persen. Persentase penggunaan elpiji tercatat terus mengalami kenaikan sejak tahun 2015.

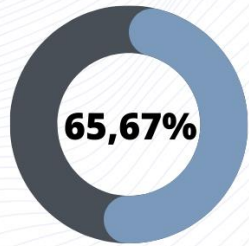
<https://klungkungkab.bps.go.id>

TEKNOLOGI INFORMASI

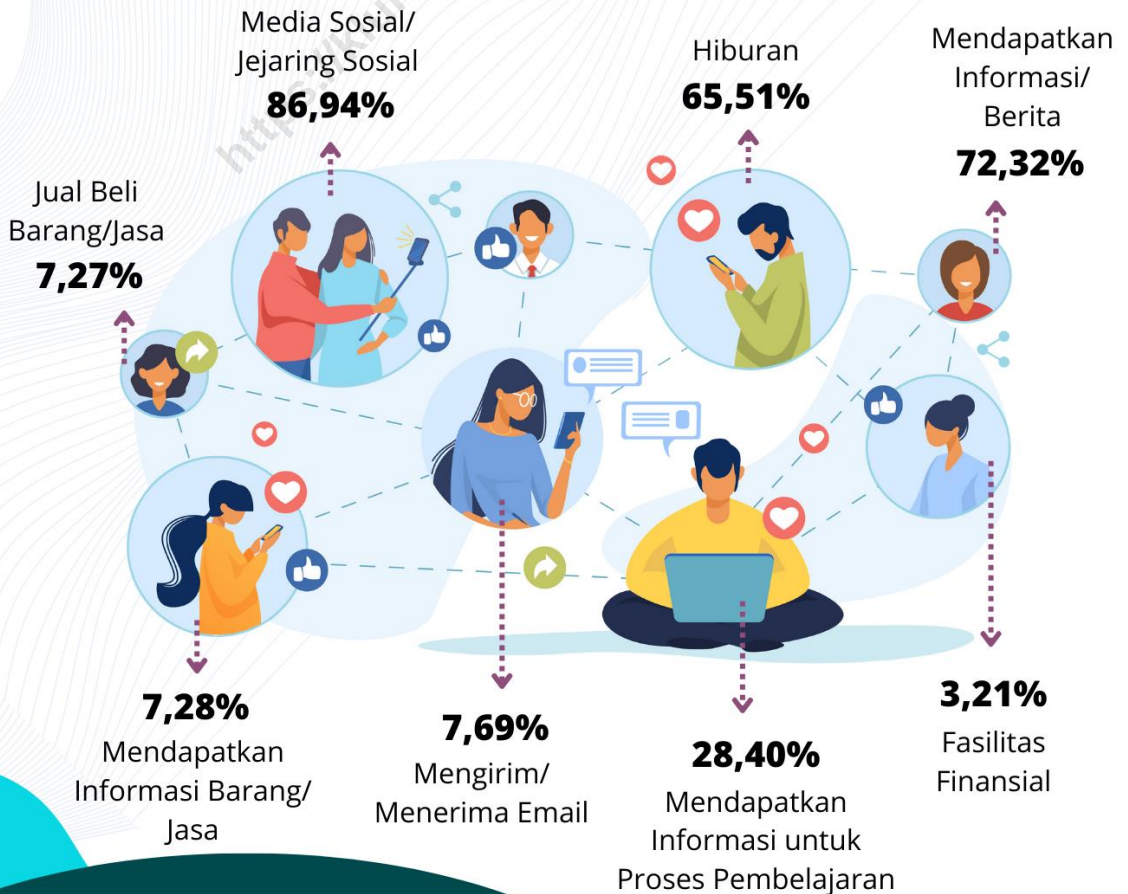


Penduduk laki-laki usia 5 tahun ke atas lebih banyak menggunakan perangkat elektronik dibandingkan perempuan, Kabupaten Klungkung 2022

Penduduk laki-laki usia 5 tahun ke atas lebih banyak mengakses internet dibandingkan perempuan, Kabupaten Klungkung 2022



Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Mengakses Internet untuk Apa Saja dalam 3 Bulan Terakhir, 2021



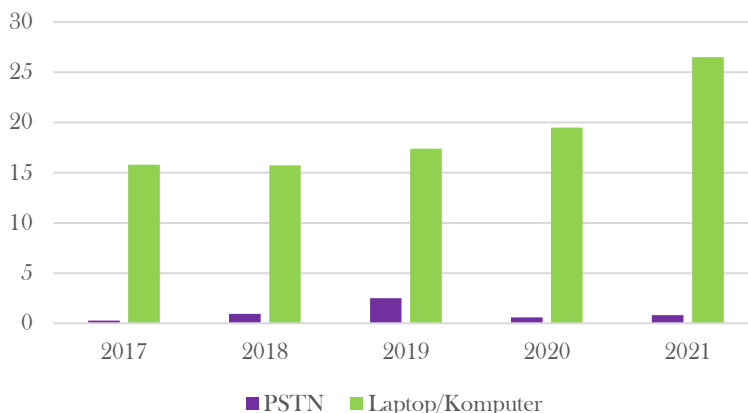
BAB VI

TEKNOLOGI INFORMASI

VI.1 Akses Perangkat Elektronik dan Internet

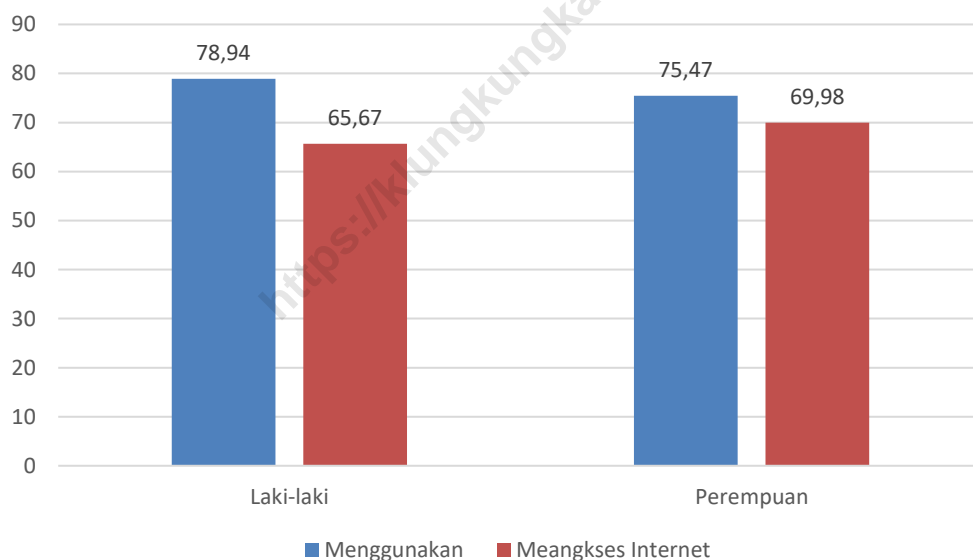
Akses teknologi informasi semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Arus informasi semakin cepat dan hampir semua penduduk mengalami perubahan cara hidup karenanya. Interaksi sosial mengalami penurunan seiring dengan semakin cepatnya tingginya portabilitas dan fleksibilitas peralatan komunikasi. Meskipun semua orang menjadi pengguna teknologi dan penerima layanan dari berbagai perusahaan jasa ini, bagi semua orang sesungguhnya kemajuan teknologi hanya berdampak signifikan pada satu hal yaitu kemudahan berkomunikasi. Selain itu manfaat teknologi adalah manfaat tambahan yang belum bisa dialokasikan untuk membuat hidup menjadi lebih efisien. Portabilitas adalah salah satu mengapa peranti teknologi informasi dalam konteks ini telepon genggam mengungguli penggunaan telepon rumah maupun komputer. Daya sebarannya jauh lebih kuat seiring dengan harga yang semakin terjangkau. Bisa diartikan bahwa bahwa telepon genggam (HP) adalah benda yang harus dimiliki setiap anggota rumah tangga sementara laptop adalah barang yang cukup dimiliki satu dalam satu rumah tangga.

Grafik VI.1 Persentase Kepemilikan Laptop/Komputer dan PSTN Menurut Rumah Tangga di Kabupaten Klungkung, 2017-2021



Fenomena ini bisa dilihat dari semakin menurunnya kepemilikan telepon rumah dan juga laptop. Kepemilikan telepon rumah tercatat hanya sekitar 0,81 persen di tahun 2021. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kepemilikan laptop yang mencapai 26,52 persen. Ini berarti laptop dimiliki oleh 1 diantara 4 rumah tangga sementara kepemilikan telepon rumah hanya sekitar 1 dari 100 lebih rumah tangga. Dan yang paling penting adalah persentase kepemilikan telepon rumah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan kepemilikan laptop semakin meningkat. Satu hal mengenai data kepemilikan laptop adalah peningkatan persentase pada rumah tangga bisa jauh lebih tinggi apabila dilihat pada persentase kepemilikan per penduduk.

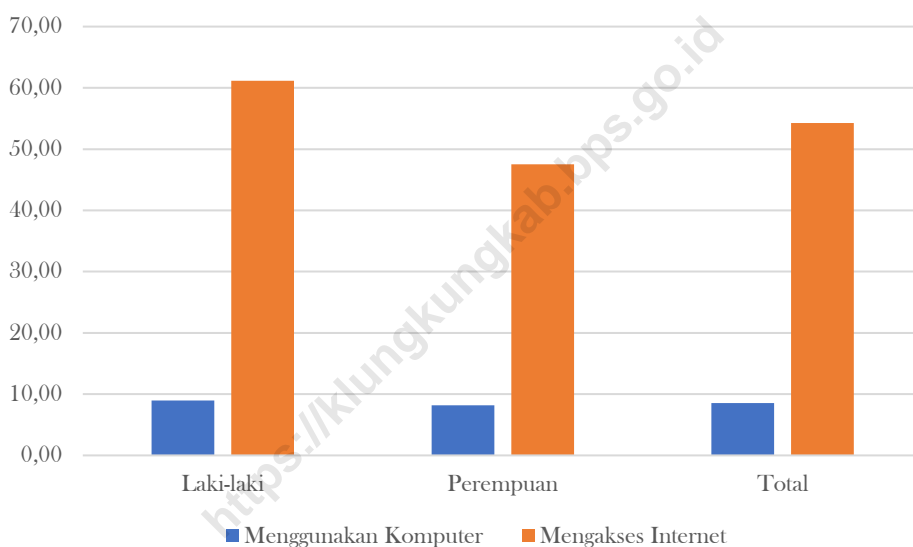
Grafik VI.2 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Kepemilikan dan Penggunaan Telepon Genggam di Kabupaten Klungkung, 2022



Proporsi ini jauh di bawah kepemilikan dan penggunaan telepon genggam. Lebih dari 50 persen penduduk usia 5 tahun ke atas di Klungkung telah menggunakan telepon genggam. Persentase ini berpotensi meningkat dari tahun ke tahun dengan semakin beragamnya fitur yang ditawarkan oleh perusahaan ponsel. Mengingat dalam data ini termasuk penduduk yang berusia 5 tahun ke atas maka sangat mungkin bahwa persentase penggunaan telepon genggam akan jauh lebih dari persentase kepemilikannya. Selain itu

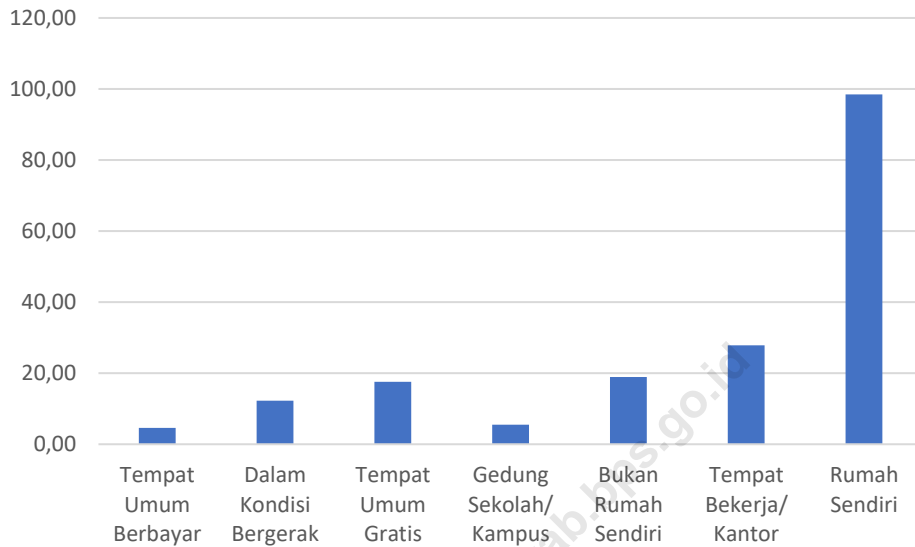
kepemilikan dan penggunaan penduduk perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Penggunaan perangkat elektronik oleh penduduk laki-laki mencapai 78,94 persen meskipun yang mengakses internet hanya 65,67 persen sementara hanya 75,47 persen penduduk perempuan menggunakan perangkat meskipun hanya 69,98 persen yang mengaksesnya.

Grafik VI.3 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dan Menggunakan Komputer Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung, 2021



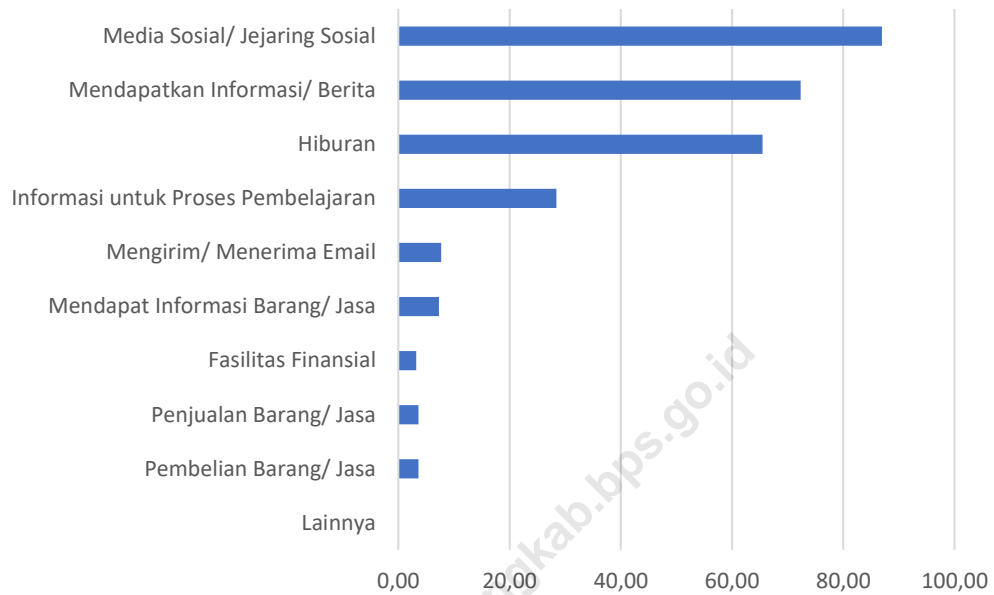
Persentase penduduk yang menggunakan komputer juga tercatat jauh lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan internet. Di tahun 2021 yang menggunakan komputer hanya 8,55 persen penduduk sementara yang mengakses internet mencapai 54,24 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar pengguna internet tidak mengaksesnya melalui komputer melainkan melalui perangkat lain. Hasil lainnya menunjukkan bahwa HP atau ponsel adalah perangkat yang paling sering digunakan dalam mengakses internet. 99,10 persen penduduk Klungkung pernah mengakses internet melalui perangkat ini.

Grafik VI.4 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Menurut Lokasi di Kabupaten Klungkung, 2021



Menurut lokasi aksesnya, 98,49 persen penduduk Klungkung mengakses internet di rumah sendiri. Artinya hanya sekitar 2 persen yang tidak mengakses internet di rumah sendiri. Persentase lokasi akses lainnya jauh lebih rendah, seperti hanya 5,51 persen yang melakukan akses saat di gedung sekolah/kampus. Selain itu akses internet yang dilakukan di tempat umum gratis lebih tinggi, hal ini terlihat dari persentasenya yang sebesar 22,23 persen. Rendahnya kedua akses di tempat ini terjadi karena ketersediaan wifi publik di wilayah Klungkung masih tergolong sedikit dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Grafik VI.5 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Menurut Penggunaannya di Kabupaten Klungkung, 2021

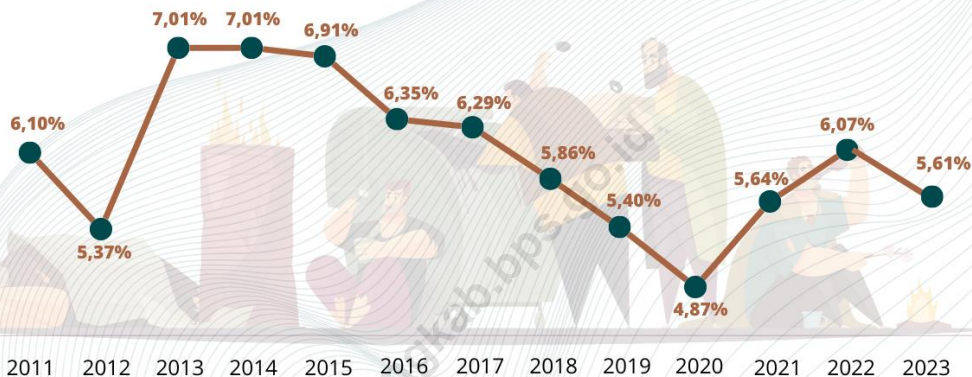


Meskipun akses internet semakin meningkat dari tahun ke tahun, dampak langsungnya terhadap kenaikan produktivitas penduduk secara umum tidaklah terlalu besar. Hal ini terlihat dari persentase akses internet yang sebagian besar ditujukan untuk informasi/berita dan media sosial. Persentase kedua akses ini bahkan di atas 70 persen. Akses untuk kegiatan spesifik lain yang berhubungan dengan produktivitas hanya sekitar 30 persen ke bawah. Selain itu hanya 7,69 persen yang memanfaatkan internet untuk berkirim surat elektronik dan bahkan untuk aktivitas yang berhubungan langsung dengan penjualan, penggunaan internet hanya 7,26 persen.

INDIKATOR KESEJAHTERAAN LAINNYA



Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung, 2011-2023



Indeks Keparahan Kemiskinan

0,09

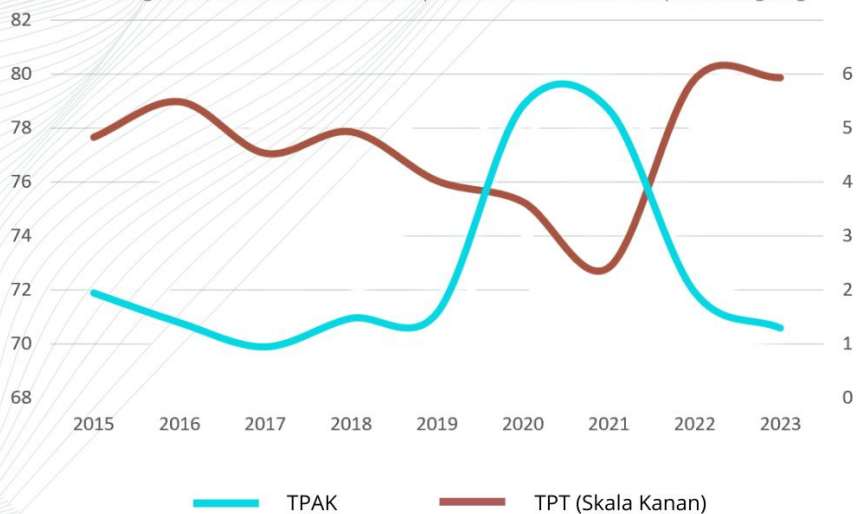
0,58

Indeks Kedalaman Kemiskinan

2023

Perkembangan TPT dan TPAK di Kabupaten Klungkung, 2015-2023

Dampak tekanan pandemi covid-19 2022 tidak sekuat tahun 2020 dan 2021, juga mengindikasikan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung



BAB VII

INDIKATOR KESEJAHTERAAN LAINNYA

Secara umum, kesejahteraan penduduk tidak hanya diukur melalui berbagai indikator mikro yang dibandingkan antar waktunya. Indikator makro kiranya juga mampu memberikan gambaran mengenai kesejahteraan penduduk. Indikator makro berbicara mengenai gambaran umum, sementara di sisi lain semakin membaiknya dampak pembangunan bagi kesejahteraan telah mengakibatkan persoalan kesejahteraan berubah dari masalah umum kolektif menjadi masalah selektif yang hanya dirasakan oleh segelintir penduduk. Sebagai contoh di negara berkembang yang tingkat kesempatan kerjanya masih rendah, maka pengangguran adalah masalah negara yang menjadi perhatian bersama. Di sisi lain di negara maju, pengangguran adalah masalah spesifik karena sebagian besar penduduknya telah bekerja. Ketika ekonomi membaik solusi-solusi masalah yang awalnya bersifat umum akan menjadi solusi yang lebih spesifik.

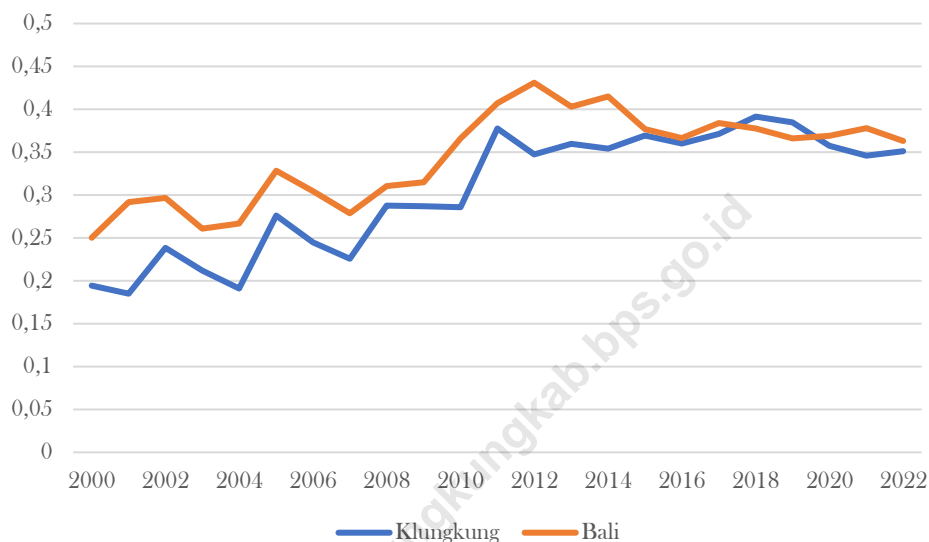
VII.1 Ketimpangan

Berangkat dari hal itu untuk menghubungkan antara perkembangan ekonomi dan aksesnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, para ahli seringkali membandingkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kondisi ketimpangan yang diukur melalui gini rasio. Gini rasio merupakan rasio yang diambil dari kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2021, tercatat hanya pada tahun 2018 dan 2019 gini rasio Klungkung lebih tinggi dibandingkan dengan rasio gini Bali. Pada tahun 2018 dan 2019 Gini Rasio Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 0,39 dan 0,38 sementara untuk Provinsi Bali mencapai 0,38 dan 0,37 untuk tahun yang sama. Di lain pihak pada tahun 2022, gini rasio di Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 0,35 sementara

Provinsi Bali tercatat mencapai 0,36 Ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di Klungkung dan Bali tergolong masih rendah dan bergerak pada kecepatan yang moderat.

Grafik VII.1 Perkembangan Indikator Gini Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali, 2000-2022



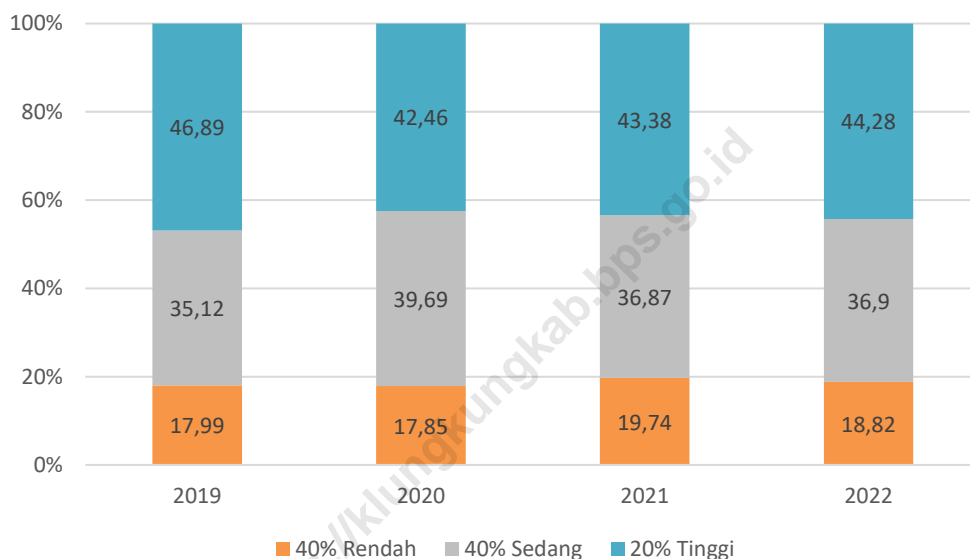
Menurunnya rasio gini sejak tahun 2018 didorong oleh membaiknya persentase pengeluaran oleh kelompok terbawah dan kelompok menengah menurut distribusi pengeluaran versi Bank Dunia. Berbeda halnya dengan Gini rasio, distribusi pengeluaran oleh Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah;
- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk

kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Grafik VII.2 Perkembangan Distribusi Pendapatan Menurut Bank Dunia Kabupaten Klungkung, 2019-2022



Pada tahun 2019 hingga 2022, porsi terbesar pengeluaran rumah tangga dipegang oleh 20 persen penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Persentase ini mengalami peningkatan pada tahun 2022. Penurunan terjadi pada kelompok menengah terbawah yang turun dari 19,74 persen menjadi 18,82 persen.

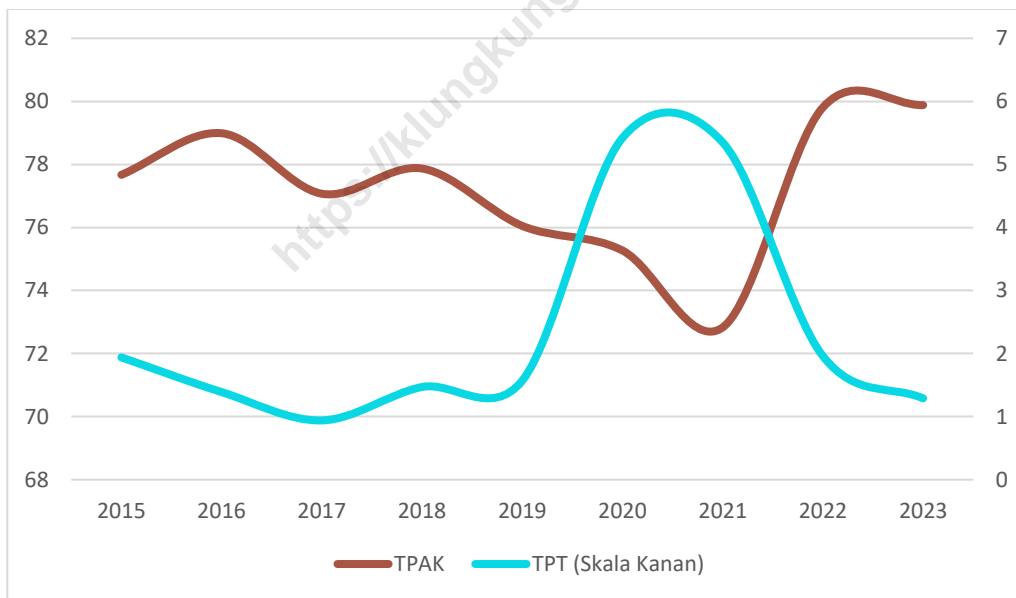
VII.2 Pengangguran

Selain ketimpangan, permasalahan sosial selektif yang sering menjadi perhatian adalah pengangguran. Pengangguran atau pengangguran terbuka adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja) atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak pernah mencari pekerjaan karena

merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

Selain diukur dengan ukuran absolut, pengangguran juga dilihat dari persentasenya atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Ukuran TPT biasanya juga disandingkan dengan indikator TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Grafik VII.3 Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Klungkung, 2015-2022



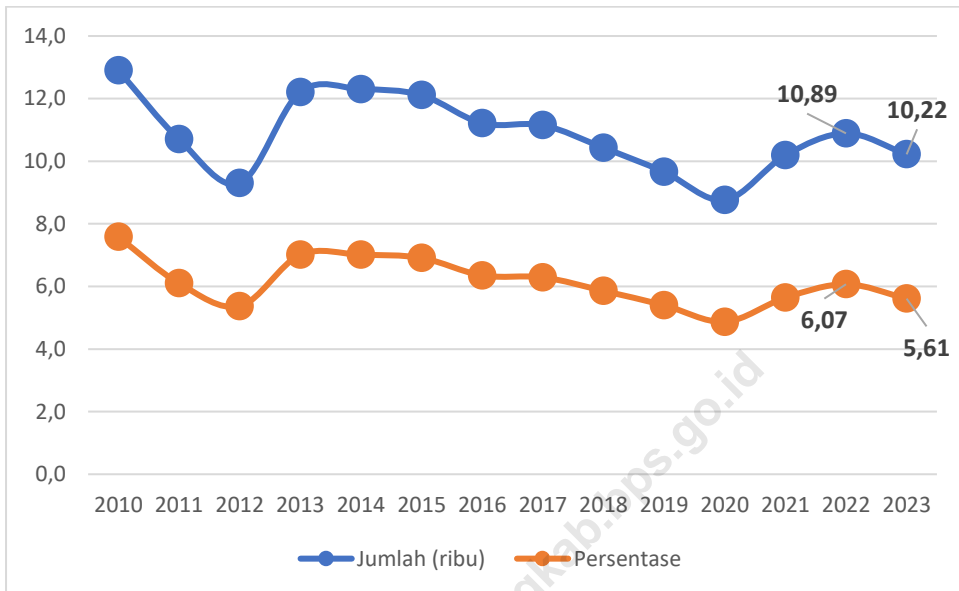
TPAK di tahun 2022 mencapai 29,81 persen sementara itu TPT mencapai 1,96 persen. Capaian TPAK di tahun ini merupakan yang tertinggi, sementara itu TPT justru mencapai titik terendahnya. Perbaikan pada kedua indikator ketenagakerjaan ini

menunjukkan bahwa dampak tekanan pandemi di tahun 2022 tidak sekuat yang dirasakan pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini kemungkinan akan memberikan dampak positif terhadap penciptaan nilai tambah seiring dengan membaiknya situasi ekonomi terutama pariwisata yang semakin kondusif. TPAK yang membaik menunjukkan bahwa semakin besar penduduk usia kerja yang memiliki kesempatan untuk bekerja di berbagai lapangan usaha. Hal ini juga mengindikasikan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi Klungkung di tahun 2022.

VII.3 Kemiskinan

Selain berhubungan dengan pengangguran, kesejahteraan juga seringkali dihubungkan dengan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Penentuan penduduk miskin beserta indikator turunannya ditentukan oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/pengeluaran. Termasuk pengeluaran adalah perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.

Grafik VII.4 Perkembangan Jumlah (000 Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klungkung, 2010 - 2023



Pada bulan Maret tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 10,22 ribu orang atau sekitar 5,61 persen jumlah penduduk Klungkung. Jumlah ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 10,89 ribu jiwa dengan persentase mencapai 5,61 persen.

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KLUNGKUNG**

Jl. Raya Besakih, Desa Akah, Kecamatan Klungkung 80751

Tlp. (0366) 21180, Fax. (0366) 24242

E-mail: bps5105@bps.go.id

Homepage: <https://klungkungkab.bps.go.id>